



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



BIOGRAFI

PROF. DR. FAISAL ISMAIL, M.A.

(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
periode Maret s/d Mei 2000)

HAMDAN DAULAY

Hamdan Daulay

**BIOGRAFI
PROF. DR. FAISAL ISMAIL, M.A.**

**(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Periode Maret s/d Mei 2000)**



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hamdan Daulay

BIOGRAFI PROF. DR. FAISAL ISMAIL, M.A
(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Periode Maret s/d Mei
2000) / Hamdan Daulay, cet.1.— Yogyakarta:
Idea Press Yogyakarta, 2013.
viii, 66 hlm., 15.5 cm x 23.5 cm.
ISBN: 978-602-8686-31-0

1. Biografi Tokoh 1. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit dan Penulis, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

BIOGRAFI PROF. DR. FAISAL ISMAIL, M.A
(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Periode Maret s/d Mei 2000)

Setting Layout: Tim Idea Press Yogyakarta
Desain Cover: Fatkhur Roji
Cetakan Pertama; September 2013
Penulis: Hamdan Daulay
Penerbit: IDEA Press Yogyakarta

Dicetak Oleh: CV. Idea Sejahtera
Alamat: Jl. Amarta, Diro RT 58 , Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Tlp: 0274-6466541, 0817263952
E-mail:idea_press@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

BIOGRAFI PROF. DR. FAISAL ISMAIL, M.A
(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Periode Maret s/d Mei 2000)

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Kerangka Pemikiran Teoritik.....	5
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pengumpulan Data.....	15
3. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	15
G. Profil Pribadi.....	16
H. Kepemimpinan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga	42
I. Profil Akademik dan Pengalaman Kerja.....	50
Daftar Pustaka	65

Abstrak

Memahami dan mengenal sejarah adalah merupakan bagian penting dalam peradaban umat manusia. Begitu pentingnya memahami sejarah, sampai Soekarno pernah mengatakan dalam pidato politiknya tahun 1967, yang berjudul “jasmerah” (jangan melupakan sejarah). Karena sesungguhnya bangsa yang besar adalah mereka yang tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsanya. Mengetahui sejarah berarti bisa mengetahui peristiwa masa lalu untuk diambil hikmahnya sekaligus untuk diteladani aspek-aspek positif yang ada di dalamnya. Sebaliknya, manakala ada aspek negatif dari peristiwa sejarah tersebut agar bisa dihindari oleh generasi penerus.

Begitu pentingnya mengenal sejarah, maka begitu banyak muncul buku biografi tokoh yang menonjol dalam bidangnya masing-masing. Karena para tokoh tersebut memiliki keteladanan yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Biografi diperlukan karena biografi adalah karya tulis seseorang yang memaparkan riwayat hidup orang lain, biasanya karena perjuangannya yang patut dicontoh. Lewat biografi tersebut akan bisa dipahami bagaimana keteladanan, keunggulan, hingga berbagai strategi yang dilakukan seorang tokoh dalam menjalankan kebijakan.

Demikian pula dengan perjalanan sejarah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah cukup lama ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kemajuan yang diraih Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga saat ini tentu tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan para tokoh yang ikut andil di dalamnya, mulai dari karyawan, dosen, hingga direktur Pascasarjana. Dari aspek manajemen, tentu direktur Pascasarjana sebagai pemimpin kelembagaan memiliki kesempatan, wewenang, dan gagasan yang lebih luas untuk menentukan perkembangan Pascasarjana. Setiap pemimpin tentu memiliki gaya dan pemikiran yang berbeda, sehingga semakin menarik untuk diteliti dalam

rangka menulis sejarah perkembangan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dari masa ke masa.

Meneliti dan sekaligus menulis biografi masing-masing direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak berdiri hingga sekarang, tentu merupakan karya yang menarik. Dari rangkaian sejarah itu akan bisa diketahui nanti bagaimana model kepemimpinan masing-masing direktur, hingga apa saja prestasi yang mereka raih selama memimpin Pascasarjana. Catatan sejarah tentu juga harus ditulis dengan jujur dan obyektif dalam menilai kepemimpinan masing-masing tokoh. Sebab masing-masing direktur Pascasarjana UIN Suka memiliki waktu yang berbeda dan tantangan yang berbeda dalam masa kepemimpinannya. Ada diantara mereka yang memiliki waktu memimpin lebih 3 tahun, ada yang kurang dari 2 tahun, hingga ada yang hanya beberapa bulan. Dengan demikian kesempatan yang bisa mereka lakukan untuk membuat perubahan, dan mengaktualisasikan berbagai gagasan cemerlang tentu menghadapi tantangan yang berbeda.

Salah satu diantara direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Prof. Dr. Faisal Ismail, MA. Ia tergolong direktur Pascasarjana UIN Suka yang paling singkat waktu kepemimpinannya. Kesempatannya dalam memimpin Pascasarjana hanya sekitar tiga bulan (Maret s/d Mei 2000). Namun walaupun hanya dalam waktu singkat ia cukup mampu mengharumkan nama Pascasarjana UIN Suka. Ditambah lagi dengan karier yang semakin cemerlang yang diraih Prof. Faisal Ismail setelah memimpin Pascasarjana, tentu ikut menjadi kebanggaan tersendiri bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menjabat direktur Pascasarjana UIN Suka, Kementerian Agama RI memberi kepercayaan kepadanya menjadi Kepala Litbang Kemenag RI, kemudian dilanjutkan menjadi Sekjen Kementerian Agama, Staf ahli Menteri, hingga menjadi Duta Besar RI di Kuwait dan Bahrain. Ini tentu prestasi yang patut dibanggakan dari seorang putra terbaik kampus UIN Sunan Kalijaga.

Prof. Dr. Faisal Ismail adalah orang yang sederhana, bersahaja, dan egaliter. Setelah menyelesaikan program doktornya di Kanada, Faisal Ismail kembali ke Yogyakarta dan menjabat sebagai Asisten Direktur II program Pascasarjana UIN UIN Sunan Kalijaga (Mei 1996 s/d Februari 1997). Dari Februari 1997 s/d Februari 2000, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya selama tiga bulan (Maret s/d Mei 2000) ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam kapasitasnya sebagai direktur Pascasarjana dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, ia secara otomatis menjadi anggota senat Universitas.

BIOGRAFI PROF. DR. FAISAL ISMAIL, M.A.
(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Periode Maret s/d Mei 2000)

A. Latar Belakang

Memahami dan mengenal sejarah adalah merupakan bagian penting dalam peradaban umat manusia¹. Begitu pentingnya memahami sejarah, sampai Soekarno pernah mengatakan dalam pidato politiknya tahun 1967, yang berjudul “jasmerah” (jangan melupakan sejarah). Karena sesungguhnya bangsa yang besar adalah mereka yang tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsanya. Mengenal sejarah berarti bisa mengetahui peristiwa masa lalu untuk diambil hikmahnya sekaligus untuk diteladani aspek-aspek positif yang ada di dalamnya. Sebaliknya, manakala ada aspek negatif dari peristiwa sejarah tersebut agar bisa dihindari oleh generasi penerus.

Begitu pentingnya mengenal sejarah, maka begitu banyak muncul buku biografi tokoh yang menonjol dalam bidangnya masing-masing. Karena para tokoh tersebut memiliki keteladanan yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Biografi diperlukan karena biografi adalah karya tulis seseorang yang memaparkan riwayat hidup orang lain, biasanya karena perjuangannya yang patut dicontoh². Lewat biografi tersebut akan bisa dipahami

¹ Marsono, *Urgensi Sejarah dalam Peradaban Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004) hlm. 66

² Ahmad Wardana, *Mengenal Tokoh Lewat Biografi*, (Bandung: Rosdakarya, 2007) hlm, 72

bagaimana keteladanan, keunggulan, hingga berbagai strategi yang dilakukan seorang tokoh dalam menjalankan kebijakan.

Demikian pula dengan perjalanan sejarah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah cukup lama ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kemajuan yang diraih Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga saat ini tentu tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan para tokoh yang ikut andil di dalamnya, mulai dari karyawan, dosen, hingga direktur Pascasarjana. Dari aspek manajemen, tentu direktur Pascasarjana sebagai pemimpin kelembagaan memiliki kesempatan, wewenang, dan gagasan yang lebih luas untuk menentukan perkembangan Pascasarjana. Setiap pemimpin tentu memiliki gaya dan pemikiran yang berbeda, sehingga semakin menarik untuk diteliti dalam rangka menulis sejarah perkembangan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dari masa ke masa.

Meneliti dan sekaligus menulis biografi masing-masing direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak berdiri hingga sekarang, tentu merupakan karya yang menarik. Dari rangkaian sejarah itu akan bisa diketahui nanti bagaimana model kepemimpinan masing-masing direktur, hingga apa saja prestasi yang mereka raih selama memimpin Pascasarjana. Catatan sejarah tentu juga harus ditulis dengan jujur dan obyektif dalam menilai kepemimpinan masing-masing tokoh. Sebab masing-masing direktur Pascasarjana UIN Suka memiliki waktu yang berbeda dan tantangan yang berbeda dalam masa kepemimpinannya. Ada diantara mereka yang memiliki waktu memimpin lebih 3 tahun, ada yang kurang dari 2 tahun, hingga ada yang hanya beberapa bulan. Dengan demikian kesempatan yang bisa mereka lakukan untuk membuat perubahan, dan mengaktualisasikan berbagai gagasan cemerlang tentu menghadapi tantangan yang berbeda.

Salah satu diantara direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Prof. Dr. Faisal Ismail, MA. Ia tergolong direktur Pascasarjana UIN Suka

yang paling singkat waktu kepemimpinannya. Kesempatannya dalam memimpin Pascasarjana hanya sekitar tiga bulan (Maret s/d Mei 2000). Namun walaupun hanya dalam waktu singkat ia cukup mampu mengharumkan nama Pascasarjana UIN Suka. Ditambah lagi dengan karier yang semakin cemerlang yang diraih Prof. Faisal Ismail setelah memimpin Pascasarjana, tentu ikut menjadi kebanggaan tersendiri bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menjabat direktur Pascasarjana UIN Suka, Kementerian Agama RI memberi kepercayaan kepadanya menjadi Kepala Litbang Kemenag RI, kemudian dilanjutkan menjadi Sekjen Kementerian Agama, Staf ahli Menteri, hingga menjadi Duta Besar RI di Kuwait dan Bahrain. Ini tentu prestasi yang patut dibanggakan dari seorang putra terbaik kampus UIN Sunan Kalijaga.

Prof. Dr. Faisal Ismail adalah orang yang sederhana, bersahaja, dan egaliter. Setelah menyelesaikan program doktornya di Kanada, Faisal Ismail kembali ke Yogyakarta dan menjabat sebagai Asisten Direktur II program Pascasarjana UIN UIN Sunan Kalijaga (Mei 1996 s/d Februari 1997). Dari Februari 1997 s/d Februari 2000, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya selama tiga bulan (Maret s/d Mei 2000) ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam kapasitasnya sebagai direktur Pascasarjana dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, ia secara otomatis menjadi anggota senat Universitas.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas, jelaslah bahwa catatan sejarah tentang berbagai karya dan prestasi yang dilakukan oleh manusia sangat penting. Karena lewat catatan sejarah tersebut akan diperoleh banyak hikmah bagi generasi yang akan datang. Demikian pula halnya dengan sejarah perkembangan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu perlu diketahui sejarahnya. Dalam hal ini perlu ditulis biografi

pada direktur Pascasarjana UIN Suka yang telah berjuang keras memajukan lembaga pendidikan ini. Lebih fokus lagi dalam penelitian ini adalah terkait dengan biografi Prof. Dr. Faisal Ismail, MA yang menjadi direktur Pascasarjana hanya beberapa bulan. Dalam waktu yang cukup singkat itu tentu ada karya-karya menarik yang telah dilakukan. Lebih utuh lagi sebagai catatan biografi, tentu perlu diketahui lebih mendalam bagaimana sosok seorang tokoh, mulai dari latar belakang akademiknya, model kepemimpinannya, hingga karier akademiknya di tengah masyarakat. Untuk itu ada tiga pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana profil pribadi Prof. Dr. Faisal Ismail dari Sumenep (Madura) hingga menjadi Duta Besar RI?
2. Bagaimana profil kepemimpinan Faisal Ismail selama menjabat direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga?
3. Bagaimana profil akademik dan pengalaman kerja Prof. Dr. Faisal Ismail dalam mengharumkan kampus UIN Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang biografi Prof. Dr. Faisal Ismail ini, adalah untuk mengungkap data terkait dengan peran perjuangannya secara umum dan lebih khusus lagi model kepemimpinannya ketika mengemban tugas sebagai direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dari data-data tersebut akan diuraikan nanti dalam bentuk biografi yang menarik, sehingga bisa diperoleh informasi yang utuh terkait dengan berbagai kebijakan dan model kepemimpinannya secara umum dan lebih khusus lagi ketika memimpin pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan Pascasarjana ke depan. Sebab biografi adalah bagian dari catatan sejarah yang sangat berguna bagi generasi penerus, sehingga bisa diketahui bagaimana karya-karya yang dilakukan oleh seorang tokoh yang patut diteladani dalam rangka mencapai kemajuan. Catatan sejarah bisa menjadi acuan bagi generasi penerus untuk melangkah lebih maju dan lebih baik ke depan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Rosnila Kusuma¹ yang berjudul "Memahami Sejarah Pendidikan di Indonesia, menjelaskan tentang potret sejarah perkembangan pendidikan yang terjadi di Indonesia, mulai dari masa penjajahan, hingga masa kemerdekaan. Fokus utama yang diulas dalam penelitian tersebut adalah pada aspek sejarah pendidikan, tokoh-tokohnya, hingga berbagai tantangan yang dihadapi. Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena fokus penelitian ini adalah pada aspek biografi seorang tokoh yang pernah menjadi direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian tentang sejarah dan juga otobiografi juga dilakukan oleh Soebagijo IN² dengan judul *Jagat Wartawan Indonesia*. Dalam penelitian ia menyajikan otobiografi tokoh-tokoh pers Indonesia, seperti Adam Malik, M. Yunan Nasution, Muhammad Natsir, Sayuti Melik, Mochtar Lubis, hingga Wonohito dan Samawi. Walaupun sama-sama menulis biografi tokoh, namun jelas ada perbedaan nyata antara dua penelitian ini. Kalau Soebagijo IN menulis tentang biografi tokoh pers Indonesia, maka penulis meneliti tokoh pendidikan yang kebetulan pernah menjadi direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Kerangka Pemikiran Teoritik

Sejarah catatan peristiwa masa lalu, masa kini dan prediksi untuk masa yang akan datang. Peradaban suatu bangsa akan dikenal, dipahami dan bahkan dipelajari oleh bangsa lain lewat catatan sejarah yang ada, sehingga catatan sejarah menjadi bagian penting dalam peradaban.³ Begitu pentingnya mengenal sejarah, maka begitu banyak muncul buku biografi tokoh yang menonjol dalam bidangnya masing-masing. Karena

¹ Rosnila Kusuma, *Memahami Sejarah Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2009)

² Soebagijo IN, *Jagat Wartawan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003)

³ Ahmad Wirawan, *Memahami Sejarah*, (Bandung: Rosdakarya, 2008) hlm. 86

para tokoh tersebut memiliki keteladanan yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Biografi diperlukan karena biografi adalah karya tulis seseorang yang memaparkan riwayat hidup orang lain, biasanya karena perjuangannya yang patut dicontoh. Lewat biografi tersebut akan bisa dipahami bagaimana keteladanan, keunggulan, hingga berbagai strategi yang dilakukan seorang tokoh dalam menjalankan kebijakan.

Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat, pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan mnat manusia. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal yang termaktub dalam pasal 1, pengertian pendidikan sebagai berikut:

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan pengertian di atas maka pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Kesengajaan atas kesadaran inilah yang menjadikan pendidikan memiliki rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Konsep dan dasar ini dibuat tidak lain sebagai sarana untuk tercapinya suatu tujuan. Istilah ini sering dipahami dengan “kebijakan”.

Selama ini kebijakan politik pemerintah di era orde baru, cenderung sentralisasi. Fenomena sntralisasi kekuasaan ini terjadi akibat adanya penafsiran yang salah terhadap ketentuan UUD 1945.⁶ Upaya ini dimulai dari membuat kebijaksanaan, implementasi, dan evaluasi kebijaksanaan dilaksanakan secara terpusat dan dilakukan oleh aparat pemerintah pusat.

⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 21

Sistem pemerintahan hanya berada pada satu pusat kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan terpusat dalam satu tangan, dan tidak didistribusikan ke bawah (daerah).⁷

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, maka pemerintah daerah kurang sekali dalam mengambil bagian dalam administrasi apa pun. Semuanya hanyalah merupakan pekerjaan perantara, sebagai penyambung atau penyalur kebijakan pemerintah pusat untuk dilaksanakan lembaga pendidikan di daerah.

Dalam struktur organisasi yang berbentuk sentralisasi, membentanglegak lurus dari atas kebawah. Segalasesuatutentang urusan pendidikan mulai dari membentuk kebijakan, penentuan kurikulum, bangunan sekolah, hingga penyelenggaraan ujian, semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sekolah di daerah hanya merupakan pelaksana pasif semata. Sesuai dengan sisten sentralisasi dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah dan guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya , serta dalam prosedur pelaksanaan tugas, sangat dibatasi oleh peraturan melalui hirarki atasan.⁸

Dalam sistem sestralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya keseragaman yang sempurna bagi seluruh darah di lingkungan wilayah negara. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan , terutama di sekolah-sekolah yang setingkat dan sejenis. Misalnya kseragaman organisasi sekolah, rencana pelajaran, buku pelajaran, metode mngajar, soal-soal, dan waktu penyelenggaraan ujian, tanpa memperhatikan keragaman masing-masing daerah.

Tilaar berpendapat bahwa pendidikan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan kehidupan serta kohesi nasional karena peserta didiknya adalah kelompok umur yang secara pedagogik sangat peka terhadap

⁷Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 176

⁸M Ngalim Purwano, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 127

pembentukan kepribadian. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pendekatan sentralistik masih diperlukan, terutama untuk menentukan kurikulum pendidikan nasional dan menetapkan anggaran pendidikan, agar dapat dicapai kesamaan dan pemerataan standar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.⁹

Ciri-ciri lembaga pendidikan yang memakai model sentralistik, bisa dijelaskan berikut ini:

1. Pendidikan sentralistik diterapkan secara over regulatif
2. Bersifat formalitas semu
3. Cenderung otoriter
4. Pengambilan keputusan bersifat top-down
5. Kontrol dan arahan cenderung individual sangat kaku
6. Mengutamakan individu yang cerdas daripada tim kerja yang cerdas
7. Menekankan pada pendelegasian
8. Mengutamakan pengaturan eksternal birokratis¹⁰

Kelebihan dari sistem sentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Keseragaman manajemen sejak dari tahap perencanaan, pengelolaan, evaluasi hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.
2. Keseragaman pola kebudayaan masyarakat
3. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas terpusat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.
4. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi.
5. Peningkatan sumber daya dan sinergi, dimana sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat.

⁹ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Pendidikan Nasional*, (Magelang: Tera Indonesia, 2001), hlm. 23

¹⁰ *Ibid*, hlm. 66

6. Menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi
7. Mencegah sub-sub unit menjadi independen
8. Memudahkan koordinasi dan kendali manajerial
9. Meningkatkan penghematan ekonomi dan
10. Mampu meningkatkan spesialisasi

Sedangkan kelemahan dari sentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.
2. Melemahnya kebudayaan daerah
3. Kualitas manusia yang *robotic*, tanpa inisiatif dan kreatifitas
4. Melahirkan suatu pemerintahan yang otoriter sehingga tidak mau mengakui hak-hak daerah.
5. Kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik
6. Mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan masyarakat demokrasi terbuka
7. Kurangnya kemampuan daya saing yang tinggi dalam kerja sama. Di dalam masyarakat yang otoriter dan statis, daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu, masyarakat akan sangat lamban perkembangannya. Masyarakat bergerak dengan komando yang melahirkan sikap masa bodoh.¹¹

Desentralisasi di Indonesia sebenarnya sudah ada cukup lama, mulai sejak tahun 1973, dengan diterbitkannya UU NO. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Selanjutnya pada PP NO. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi dengan PP NO. 8 tahun 1995. Sedangkan menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi

¹¹Marlyn M. Helms (ed), *Encyclopedia of Management*, (Michigan: Gale Cengage Learning, 2009), hlm. 128

dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat ke daerah otonom.¹²

Adapun yang menjadi alasan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah, dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek politik desentralisasi dimaksudkan untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Kedua, dari aspek manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Ketiga, dari aspek kultural, desentralisasi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, dan keistimewaan satu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perkonomian dan kebudayaan. Keempat, dari aspek pembangunan, desentralisasi dapat melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Di negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, pendidikan bukan lagi urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan lembaga pendidikan berada sepenuhnya pada pemerintah daerah.

Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi, kepala sekolah tidak semata-mata memimpin guru di lingkungan sekolahnya. Kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai sekolahnya. Ia bertanggung jawab langsung terhadap pemerintah dan masyarakat terkait kegiatan sekolah yang dijalankan. Kepala sekolah dan guru dengan model desentralisasi ini diangkat dan diberhentikan pemerintah daerah setempat.¹⁴

Pemerintah melalui UU NO. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah menuntut pembangunan pendidikan

¹² M Ali Hasan, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003) hlm. 176

¹³ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *opcit*, hlm. 73

¹⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 130

dioptimalkan di daerah.¹⁵ Penerapan desentralisasi pendidikan disertai dengan penataan fungsi kelembagaan pendidikan mulai dari dinas pendidikan di tingkat propinsi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai operasional kebijakan, dan lembaga-lembaga pendidikan dan kontrol terhadap kualitas pengembangan profesionalitas guru.¹⁶

Penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya UU NO. 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. UU tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Demikian juga tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang cukup bagi daerah untuk lebih diberdayakan dalam arti fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar retorika.¹⁷

Kebijakan desentralisasi dan otonomi yang dilaksanakan sejak tahun 2000 membawa konsekuensi besar perubahan pendidikan di Indonesia. Sejumlah kaidah, ketentuan, peraturan, dan aneka panduan menunjukkan bahwa berbagai unit antar pusat dan sekolah tak hanya sebagai perantara, penyampai, tetapi juga menjabarkan dan membuat kebijakan operasional dan membuat kebijakan sekolah. Dalam kaitannya dengan perubahan ini,

¹⁵ E mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya, 2005) hlm. 194

¹⁶ Ishartiwi, dkk. *Asesmen Kebutuhan Pengembangan Profesionalisme Guru*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY, 2000), dlm. 2

¹⁷ Soeyanto, *Infleksibilitas Otonomi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 63

unit-unit di kabupaten/kota perlu mengembangkan kapasitas merumuskan kebijakan operasional maupun kebijakan yang menjadi wewenangnya. Penerapan pendidikan yang sentralistik di sekolah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Bersifat satu kesatuan dalam keragaman
2. Deregulatif
3. Kolaboratif tim yang cerdas
4. Koordinatif
5. Demokratis
6. Berbasis kualitas
7. Pengambilan keputusan bersifat musyawarah
8. Menguatamakan tim kerja yang cerdas
9. Mengutamakan motivasi dan pengembangan potensi diri
10. Mengutamakan informasi terbagi pada semua pihak
11. Berorientasikan keunggulan.¹⁸

Konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang telah dilimpahkan. Wewenang dari satu tingkatan manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya. Manfaat desentralisasi sama dengan manfaat delegasi yaitu melepas kebijakan, penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, semangat kerja, dan inisiatif yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendah. Manfaat-manfaat itu lebih menarik sehingga mendorong untuk berpikir lebih maju dan kritis. Namun demikian, desentralisasi yang menyeluruh tanpa koordinasi dan integrasi atau pepaduan yang efisien, tanpa pengendalian tetap, bukan hal yang diharapkan. Oleh karena itu, persoalannya bukan suatu organisasi harus melakukan desentralisasi, namun sejauh mana harus desentralisasikan.¹⁹

Dalam konsep sentralisasi dan desentralisasi manajemen

¹⁸ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 67

¹⁹Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 78

pendidikan, H.A.R. Tilaar mengemukakan tujuh unsur yang merupakan proses penentu perumusan strategi manajemen. Ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Wawasan nusantara* (sentralisasi, bisa memperkuat rasa kebangsaan, meningkatkan kohesi nasional, dan memperkuat wibawa pemerintah secara nasional. Desentralisasi, dapat memperlemah kesatuan dan persatuan nasional, mengarah pada rasa kedaerahan yang sempit, mengurangi wibawa pemerintah pusat)
2. *Demokrasi* (sentralisasi, memperlambat proses demokrasi, organisasi kuat tapi kaku, kurang partisipasi, cenderung ke arah pemerataan. Desentralisasi, proses demokrasi berjalan secara nyata, memerlukan organisasi yang fleksibel dan merata di seluruh daerah, memperkuat kemandirian)
3. *Kurikulum* (sentralisasi, mudah dicapai konsensus, memelihara budaya nasional, sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar. Desentralisasi, sulit dicapai konsensus dalam merumuskan tujuan pendidikan karena keragaman kebutuhan, dapat beradaptasi pada tuntutan lingkungan sosial budaya masyarakat)
4. *Proses belajar mengajar* (sentralisasi, kecenderungan intelektualistik, belajar abstrak tanpa pengalaman lingkungan. Desentralisasi, sangat kondusif untuk PBM, sulit menerapkan standar nasional, ketidaksamaan mutu sangat nyata)
5. *Efisiensi* (sentralisasi, cenderung bersifat makro sehingga menyebabkan kesenjangan dalam kebutuhan tenaga terampil. Desentralisasi, antara penawaran dan permintaan tenaga kerja relatif ada kesesuaian)
6. *Pembiayaan* (sentralisasi, sulit menjangkau dan memudahkan sumber daya pendidikan dalam masyarakat. Desentralisasi, dapat memobilisasi sumber daya pendidikan asal disertai partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya).
7. *Ketenagaan* (sentralisasi, ketenagaan disediakan pusat, sehingga kemungkinan ada kesulitan dalam penyebaran serta penempatannya. Desentralisasi, relatif dapat

dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan nyata, termasuk untuk daerah terpencil.²⁰

Menulis biografi seorang tokoh, menurut Deliar Noer²¹ harus ada kebenaran, kejujuran, kekritisan dan keobyektifan dari si penulis. Dengan demikian biografi bukanlah sekedar menyampaikan kesuksesan seorang dengan segala pujian yang diberikan. Justru biografi yang baik adalah menyampaikan realita apa adanya tentang tokoh yang ditulis, baik sisi positif maupun sisi negatif yang ada pada diri tokoh tersebut. Namun dalam realitanya menurut Deliar Noer, kecenderungan buku-buku biografi dewasa ini masih sangat subyektif, dengan dominan menyajikan sisi positif dari tokoh yang ditulis. Padahal diperlukan informasi yang berimbang dan kritis terkait dengan tokoh yang ditulis tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan secara menarik, logis, dan obyektif terkait dengan biografi Prof. Dr. Faisal Ismail, MA. Catatan biografi ini akan mendeskripsikan secara umum bagaimana potret perjuangannya, mulai dari latar belakang akademik, model kepemimpinannya, karier akademiknya hingga kiprahnya lebih luas di tengah masyarakat. Secara khusus dalam penelitian ini tentu akan diuraikan lebih mendalam bagaimana kepemimpinan Prof. Dr. Faisal Ismail ketika dipercaya menjadi direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dalam waktu yang cukup singkat, hanya sekitar tiga bulan.

²⁰H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: Rosdakarya, 2008) hlm. 36-38

²¹Deliar Noer, *Tokoh-tokoh Indonesia dalam Biografi Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm 57

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data utama (primer) dalam penelitian ini adalah memakai metode wawancara. Secara teoritik, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan, dan *terwawancara*, yang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, disebutkan bahwa ada tiga model wawancara, yaitu wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku terbuka.²²

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga digunakan metode pengumpulan data dengan dokumen. Secara teoritik, dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan sesuatu yang menjadi fokus penelitian.²³

3. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata yang dilengkapi dengan analisis yang tajam. Dalam proses analisis data ini melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Klarifikasi dan kategorisasi data
- b. Penyajian data
- c. Interpretasi secara kualitatif untuk memperoleh temuan penelitian yang bermakna luas terkait dengan biografi Prof. Dr. Faisal Ismail, MA.

²²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005) hlm. 186-188

²³Lexy J Moleong, *ibid*, hlm. 216-217

G. Profil Pribadi

Faisal Ismail lahir di Sumenep (Madura), 15 Mei 1947, sebagai anak sulung dari pasangan Muhammad Ismail Baidaie (ayah) dan Siti Mumirah (ibu), Faisal lahir dari latar belakang pamong di desanya (Prenduan). Kakeknya Haji Baidaie, adalah Kepala Desa Prenduan untuk masa yang panjang. Ayahnya adalah Sekretaris Desa (1957 – 1967), orang kedua di jajaran pemerintahan desa. Pada tahun 1976, Faisal menikah dengan Farida Herawati (puteri Magelang) dan dikaruniai tiga anak perempuan (Mila Maduri, Fitri Hidayati, dan Izzun Nadhif).²⁴

Faisal Ismail menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat Negeri (SRN) di Prenduan, Sumenep (lulus 1959), seraya belajar di SRN pagi hari, ia belajar di Madrasah Diniyah Mathlabul Ulum pada sore hari. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Pamekasan (1963), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta (1966), dan program S1 pada Fakultas Tarbiyah UIN (dulu IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (1973). Atas dukungan beasiswa dari program Fullbright, dari 1986 -1 988, ia memperoleh program studi S2 dalam bidang kajian Sejarah Islam di Departmen of Middle East languages and Cultures, Columbia University, Newyork, Amerika Serikat.²⁵

Bagi Faisal, mengarang merupakan panggilan jiwa yang telah ia tekuni sejak muda. Kegiatan menulis artikel telah ia rintis sejak tahun 1960-an ketika ia masih belajar di PHIN Yogyakarta. Ia mempublikasikan karya-karyanya di majalah dinding sekolahnya. Bakat menulis yang dimiliki Faisal Ismail dalam tulis menulis tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan dengan penuh ketulusan ia salurkan kepada mahasiswanya. Ia sangat senang manaka ada mahasiswa yang mau bertanya kepadanya tentang tulis menulis. Berbagai bimbingan dan nasehat ia sampaikan kepada mahasiswa yang memiliki semangat untuk menulis. Karena dalam pandangan Faisal Ismail, aktivitas menulis adalah pencerahan akademik. Seorang penulis bisa menuangkan gagasannya, sekaligus itu bagian dari aktivitas

²⁴Dokumentasi Faisal Ismail tahun 2008

²⁵ Dokumentasi Faisal Ismail tahun 2008

dakwah lewat tulisan, karena masyarakat luas bisa membaca karya tulis tersebut.

Begitu besar dorongan dan dukungan yang diberikan Faisal Ismail kepada mahasiswa untuk menulis di media massa, tidak jarang Faisal Ismail menyempatkan waktu untuk membaca dan mengoreksi sekaligus memberi masukan kepada mahasiswanya yang menulis artikel. Bahkan ia mau mengantar mahasiswanya ke kantor redaksi media massa, sekaligus memperkenalkan mahasiswa tersebut dengan pihak redaksi. Ini sungguh merupakan teladan yang baik dari seorang akademisi dalam memberi bimbingan dan dukungan kepada mahasiswa. Sangat jarang ditemukan seorang dosen begitu maksimal memberi bimbingan dan dukungan kepada mahasiswanya. Ternyata tidak sia-sia kerja keras dan bimbingan yang diberikan Faisal Ismail selama ini kepada mahasiswanya, sehingga muncullah kader-kader baru dalam tulis menulis di media massa. Saat ini cukup banyak mahasiswa bimbingan Faisal Ismail yang menjadi penulis produktif di media massa.

Banyak mahasiswanya yang terkesan dan mengenang komitmen Faisal Ismail dalam memberi bimbingan menulis di media massa. Walaupun sudah lama lulus dari kampus UIN Sunan Kalijaga, komunikasi masih tetap terjalin dengan baik. Bagi Faisal Ismail komunikasi yang terus terjalin dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa yang dibimbing puluhan thun yang lalu bisa menjadi penulis yang produktif menulis di media massa adalah merupakan kepuasan batin yang tak terhingga. Ketika mahasiswa membaca tulisannya, dan ketika mahasiswanya memberi informasi bahwa tulisannya dimuat di media massa, merupakan momen yang sangat membahagiakan.²⁶

Sepanjang karir kepengarangannya, ia telah banyak menulis artikel. Artikel-artikelnya dengan tema sosial keagamaan, sejarah dan kebudayaan, banyak muncul di berbagai majalah dan koran yang terbit di berbagai kota di tanah air, antara lain:

1. Al Jami'ah

²⁶Wawancara dengan Faisal Ismail tgl 26 September 2013

2. Arena
3. Ath Thalabah
4. Bangkit
5. Bernas
6. Kedaulatan Rakyat
7. Masa Kini
8. Mercuri Suar
9. Muhibbah
10. Suara Muhammadiyah
11. Yogya Post
12. Adil
13. Suara Merdeka
14. Jawa Pos
15. Abadi
16. Harmonis
17. Kompas
18. Media Indonesia
19. Panji Masyarakat
20. Pembina
21. Pelita
22. Republika
23. Studi Islamika
24. ulumul Qur'an dan
25. Pikiran Rakyat²⁷

Selain menulis artikel, ia juga mengarang sajak (puisi) terutama ketika ia masih berstatus sebagai pelajar mahasiswa di Yogyakarta. Ia mempublikasikan sajak-sajaknya di berbagai majalah dan koran. Sajak-sajak faisal pernah dimuat di majalah bergengsi: Sastra, Horison, Basis, dan Mimbar. Ia pernah menjadi pemenang lomba penulisan puisi yang diselenggarakan oleh Lesbumi cabang Yogyakarta (1966), dan pemenang lomba mengarang esei yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (1971).

Kumpulan sajak tunggal pertama Faisal berjudul Obsesi

²⁷Dokumentasi Faisal Ismail tahun 2008

(1982) diterbitkan oleh CV Nur Cahaya Yogyakarta. Sajak-sajaknya juga terhimpun dalam antologi Nyanyian Tanah Air (Lembaga Seni Budaya IAIN Sunan Kalijaga, 1972), Tugu: Bunga Rampai Sajak Penyair Yogya (1983), dan Tonggak: Bunga Rampai Puisi Indonesia Kontemporer (Jakarta, Gramedia, 1987). Antara 1966 – 1970 ia aktif dalam perhimpunan para pengarang muda Yogya Persada studi Klub (PSK), di bawah bimbingan penyair Umbu Landu Paranggi (pengasuh lembaran seni budaya di koran Pelopor Yogya) keanggotaan PSK sangat inklusif dan pluralis, merangkul anak-anak muda dari berbagai latar belakang etnis, tradisi, kultur dan agama. Di PSK, ia banyak mendapat pencerahan intelektual dan wawasan kultural, dan sekaligus memasuki pergaulan antaretnis, antarbudaya, dan antariman. Di PSK, ia secara intens menghayati dan meresapi arti penting nilai-nilai pluralisme dan inklusivisme.²⁸

Sejak hijrah ke kota Yogyakarta, Faisal Ismail sudah menunjukkan bakat sebagai penyair dan penulis. Bakat tersebut semakin berkembang karena dukungan lingkungan sosial yang memberi ruang kepadanya lewat berbagai diskusi dengan teman seprofesinya. Ditambah lagi dengan ketekunan dalam belajar, membuat Faisal Ismail meraih sukses dalam berbagai bidang, mulai dari bidang akademik, bidang birokrat, dan juga dalam bidang karya tulis. Dalam bidang akademik ia telah berhasil meraih karir tertinggi dengan gelar profesor. Dalam bidang birokrasi, ia telah banyak menjalankan tugas birokrasi, mulai dari dekan, direktur Pascasarjana, kepala litbang keagamaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, hingga Duta Besar. Demikian pula dalam bidang tulis menulis, sudah cukup lengkaplah karya tulis yang dilahirkan, mulai dari menulis artikel di berbagai media massa, menulis di jurnal ilmiah, hingga menulis buku dalam jumlah yang cukup banyak. Boleh dikata cukup lengkaplah pengalaman Faisal Ismail, baik dalam bidang akademik, birokrasi dan juga menulis berbagai karya ilmiah.

Pribadi Faisal Ismail yang lembut, ramah, sederhana dan bersahaja tidak berubah ketika ia mendapat jabatan strategis

²⁸ Dokumentasi Faisal Ismail tahun 2008

sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Menolong orang lemah, orang susah dan sudah mengabdikan bertahun-tahun di UIN Sunan Kalijaga sebagai tenaga honorer menjadi bukti nyata dari kepedulian Faisal Ismail. Ada beberapa tenaga honorer di UIN Sunan Kalijaga yang sudah cukup lama mengabdikan sebagai tukang parkir, tenaga kebersihan, dan tenaga administrasi, diangkat menjadi PNS ketika pak Faisal Ismail menjadi Sekjen Kemenag. Bagi mereka yang dapat bantuan dari Faisal Ismail diangkat menjadi PNS setelah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer di UIN Suka tentu tidak bisa dilupakan. Ini merupakan bukti nyata betapa besarnya komitmen Faisal Ismail membantu orang-orang susah yang tak pernah membayangkan akan berhasil menjadi PNS.²⁹

Menolong orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih benar-benar ditunjukkan Faisal Ismail ketika membantu beberapa tenaga honorer UIN Suka menjadi PNS. Kalau biasanya banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan dengan tujuan memperkaya diri, itu tidak berlaku bagi Faisal Ismail. Ia benar-benar memberi bantuan kepada mereka yang tenaga honorer itu menjadi PNS tanpa mengharapkan imbalan materi. Peristiwa ini menjadi pengalaman luar biasa bagi mereka yang langsung mendapat bantuan Faisal Ismail. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa ketika Faisal Ismail mendapat posisi atau jabatan yang tinggi, ia tidak lupa pada teman-teman lama yang masih berada di bawah.

Suka membantu orang lain adalah merupakan potret pribadi Faisal Ismail yang tetap melekat dalam kondisi apa pun kalau ia memang memiliki sesuatu untuk membantu orang lain. Ini juga ia tunjukkan pada seorang temannya seorang penulis dan wartawan di koran Kedaulatan Rakyat. Ketika ia pulang ke Yogyakarta di sela-sela kesibukannya sebagai Sekjen Kemenag, ia sempatkan untuk bertemu teman-teman lama, diajak makan-makan di warung makan nyonya Suharti. Peristiwa yang luar biasa dari pribadi Faisal Ismail adalah kesederhanaan dan

²⁹Wawancara dengan pak Catur (pegawai honorer yang sudah menjadi PNS di UIN Suka) tgl 27 September 2013

keegaliterannya. Ketika itu ada acara makan-makan di warung makan nyonya Suharti.³⁰

Dari rumah pak Faisal Ismail di jalan Kaliurang ke warung nyonya Suharti di jalan Solo ada sekitar 10 km. Pak Faisal Ismail mau dibonceng temannya naik sepeda motor untuk bertemu teman-temannya dalam acara makan bersama di warung Nyonya Suharti tersebut. Padahal sebagai Sekjen Kemenag, sebenarnya ia tinggal menelpon pejabat Kanwil kmenag Yogyakarta yang siap 24 jam untuk melayani keperluan Faisal Ismail. Sekali lagi, ini membuktikan betapa egaliter, sederhana, dan merakyat kepribadian Faisal Ismail. Ketika temennya hanya memiliki sepeda motor, ia mau dibonceng naik sepeda motor untuk acara makan bersama teman-temannya. Sungguh luar biasa teledan kepribadian yang sederhana ditunjukkan oleh Faisal Islam, yang tidak hanya lewat kata-kata, tapi benar-benar dalam realita.

Kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja menjadi potret kepribadian Faisal Ismail, sehingga tatkala ada “badai” dalam bidang pekerjaannya, ia tetap selamat. Kata kuncinya tidak lepas dari kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Peristiwanya adalah ketika ada “badai” dahsyat menimpa kementerian Agama dengan adanya dugaan kasus korupsi yang menyeret Menteri Agama Said Agil Husen al Munawwar ke penjara dan juga beberapa pejabat teras Kemenag yang lain. Dalam kasus ini Faisal Ismail tergolong pejabat yang bersih, tidak terseret kasus korupsi, walaupun jabatannya sangat strategis sebagai Sekjen Kemenag. Ini sungguh luar biasa dan menjadi catatan penting dalam karir birokrasi Faisal Ismail. Barangkali karena kejujurannya itulah, maka pada periode berikutnya ia diberi kepercayaan oleh negara menjadi Duta Besar RI di Kuwait dan Bahrain.

Menurut Zainuddin, pribadi Faisal Ismail yang jujur, sederhana, ikhlas dalam bekerja, merupakan kata kunci kesuksesannya dalam mengemban tugas sebagai Sekjen Kemenag. Banyak pegawai Kemenag RI yang mengakui tentang kejujuran, kedisiplinan, dan keikhlasan Faisal Ismail dalam bekerja, sehingga

³⁰Wawancara dengan Achmad Munif (sahabat Faisal Ismail di Yogyakarta) tgl. 5 Oktober 2013

itu bisa menjadi teladan yang sangat berarti bagi pegawai di lingkungan Kemenag. Kejujuran dan kesederhanaan itu pulalah yang membuat Faisal Ismail Selamat dari “badai” yang menimpa kemenag dalam kasus korupsi tersebut.³¹

Potret kejujuran dan keikhlasan yang ditunjukkan Faisal Ismail tidak hanya ketika menjadi Sekjen Kemenag, namun sebelum menjadi Sekjen Kemenag pun potret kejujuran itu sudah nampak nyata dalam pribadinya. Ketika ia menjadi Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, ia tunjukkan disiplin yang tinggi, dengan hadir di kantor awal waktu, dan pulang akhir waktu. Selain itu, ia juga sangat disiplin menggunakan fasilitas yang ada seperti mobil dinas Fakultas, tidak ia gunakan kalau bukan untuk keperluan dinas. Padahal dewasa ini begitu banyak pejabat negara yang menganggap mobil dinas bagaikan mobil pribadi yang biasa digunakan anak istri ke mana saja yang mereka kehendaki. Potret pribadi Faisal Ismail yang demikian memang tergolong langka di era modern saat ini, tatkala kebanyakan orang begitu mudah menghalalkan segala cara.

Terkadang kesederhanaan Faisal Ismail oleh sebagian orang dianggap berlebihan. Ketika ada panitia dies UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 misalnya mengajukan proposal dana kepada alumni UIN Suka yang dianggap sukses, Faisal Ismail dengan jujur memberi sumbangan sesuai dengan batas kemampuan yang ada waktu itu. Sementara di sisi lain ada beberapa alumni yang eselonnya di bawah Faisal Ismail bisa memberi lebih banyak dari Faisal Ismail. Pandangan sebagian orang tentang kesederhanaan Faisal Ismail ini bisa muncul dari perspektif yang berbeda. Sebagian ada yang mengatakan ia terlalu sederhana, dan sebagian yang lain mengatakan itulah potret kejujuran yang sesungguhnya. Sejatinya seorang pejabat yang jujur memang harus selalu menunjukkan kesederhanaan, bukan dengan gaya hidup mewah, dan terkesan berpoya-poya.

Potret pribadi Faisal Ismail tidak hanya pada kejujuran dan kesederhanaan, namun ia juga begitu menghormati undangan

³¹ Wawancara dengan Zainuddin (pegawai Kemenag RI di Jakarta) tgl. 5 November 2013

yang diberikan orang lain kepadanya. Pernah suatu ketika, ada undangan dari seorang mahasiswa UIN kepadanya dalam acara buka warung. Mahasiswa tersebut tergolong rajin menulis di media massa dan ingin membuka usaha tambahan dengan membuka warung makan dan minuman. Walaupun acaranya sederhana, Faisal Ismail menghargai dan menghadiri undangan itu sekaligus memberi motivasi kepada mahasiswa tersebut dengan kegigihannya dalam berkarya nyata di tengah masyarakat. Faisal Ismail sangat senang melihat mahasiswa tersebut yang rajin dan kreatif dalam berkarya, dan tentu mahasiswa tersebut pun begitu senang dan termotivasi dengan kehadiran Faisal Ismail dalam acara tersebut. Itulah potret kepribadian yang mengandung makna yang sangat positif terutama dalam memberi motivasi kepada orang lain dengan kerelaan menghargai orang lain walau sekecil apa pun acara tersebut. Kelihatan kasusnya begitu sederhana, namun makna dibalik itu sungguh luar biasa bagi orang lain, karena bisa menumbuhkan semangat juang yang lebih tinggi.

Masih terkait dengan kepribadian yang suka menghargai dan memberi motivasi kepada orang lain, pernah disampaikan seorang mahasiswa yang ingin menulis di media massa terkait dengan motivasi yang diberikan Faisal Ismail. Mahasiswa tersebut menulis satu artikel, dan sebelum dikirim ke media massa ia meminta untuk dikoreksi oleh temannya sesama mahasiswa. Komentar yang diberikan teman mahasiswa itu sangat keras, dan mengatakan artikel tersebut “jelek” dan tidak layak dikirim ke media massa. Namun artikel yang sama diserahkan mahasiswa tersebut ke pak Faisal Ismail dengan harapan diberi komentar. Ternyata komentar yang diberikan pak Faisal Ismail bertolak belakang dengan komentar pertama dari mahasiswa. Faisal Ismail mengatakan artikel tersebut sangat bagus, dan si penulis artikel (mahasiswa) punya bakat yang cemerlang yang perlu terus dikembangkan agar ke depan bisa menjadi penulis yang produktif di media massa. Akhirnya dalam perkembangan berikutnya, si mahasiswa tersebut benar-benar bisa menjadi penulis produktif di media massa.³² Ini adalah potret kepribadian yang luar biasa

³² Wawancara dengan Andi Andrianto (mahasiswa)

sebagai sosok seorang pendidik yang mampu memberi motivasi dan dorongan kepada anak didiknya agar tumbuh semangat juang yang tinggi. Walaupun Faisal Ismail sesungguhnya melihat artikel yang ditulis mahasiswa itu belum berkualitas (jelek), tapi ia tidak mengatakannya jelek, justru ia puji mahasiswa tersebut agar memiliki semangat yang lebih tinggi lagi untuk membuat karya-karya yang lebih besar.

Dalam kesempatan lain, Faisal Ismail juga mau memberi penghargaan kepada mahasiswanya yang dinilai berprestasi. Model penghargaan yang diberikan Faisal Ismail adalah dengan nuansa akademik, yaitu memberi buku kepada mahasiswa tersebut, baik buku karya pak Faisal Ismail sendiri, maupun karya orang lain. Dengan memberi buku sebagai bentuk penghargaan, tentu ada makna ganda di dalamnya, yaitu mahasiswa benar-benar merasa dihargai, dan sekaligus mendorong mahasiswa itu lebih banyak lagi membaca untuk menambah wawasan keilmuan. Banyak mahasiswa yang mendapat bimbingan pak Faisal Ismail tentang menulis di media massa, mendapat buku, dan hingga kini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka.³³

Ketika ada mahasiswanya yang pernah dibimbing dan berhasil mempublikasikan tulisannya di media massa, Faisal Ismail dengan senang membaca tulisan tersebut dan memberi pujian kepada mereka. Ia juga senang berdiskusi dengan mahasiswa baik tentang materi kuliah, dan juga tema-tema aktual yang menarik untuk ditulis di media massa. Bahkan sering Faisal Ismail mendorong mahasiswanya untuk menulis tema tertentu, ketika tema itu menarik untuk ditulis. Persoalan-persoalan pendidikan, politik, agama, sosial dan budaya selalu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi Faisal Ismail. Selesai diskusi dengan tema tertentu, biasanya ia mendorong untuk gagasan yang sudah didiskusikan itu dituangkan dalam opini di media massa.

Dari sekian banyak bentuk dorongan yang diberikan Faisal

bimbingan Faisal Ismail) tgl 3 September 2013

³³Wawancara dengan Andi andrianto, tgl 2 September 2013

Ismail kepada mahasiswanya untuk berpikir kritis dan rajin menulis di media massa, justru yang luar biasa dari pribadi Faisal Ismail adalah keteladanan. Keteladanan yang ditunjukkannya terkait dengan menulis di media massa dipuji oleh banyak orang. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ia tetap menyempatkan diri untuk menulis opini di media massa. Terkadang banyak mahasiswanya yang merasa malu dengan Faisal Ismail karena kalah produktif menulis di media massa, padahal waktu luang yang dimiliki mahasiswa jauh lebih banyak dibanding dengan Faisal Ismail.

Tidak hanya soal produktifitas menulis di media massa, namun juga komitmen dan ketekunan yang luar biasa. Aktivitas menulis di media massa sudah begitu lama ditempuh Faisal Ismail, bahkan sudah lebih 40 tahun ia terus berkarya di media massa. Sungguh luar biasa seorang bisa mempertahankan profesinya dalam waktu yang cukup lama tanpa mengenal lelah dan berhenti. Di balik itu semua tentu Faisal Ismail patut bersyukur, karena ketekunannya membimbing anak didiknya selama ini dalam tulis menulis di media massa telah membuahkan hasil dengan munculnya penulis-penulis baru dari hasil bimbingannya. Para penulis itu juga tentu akan selalu mengenang ilmu dan bimbingan yang diberikan Faisal Ismail selama ini kepada mereka. Seorang guru yang baik ada dalam potret pribadi Faisal Ismail, yaitu ingin menjadikan anak didiknya bisa lebih baik dari dirinya sendiri, sehingga ia tidak pernah lelah dan bosan berdiskusi dan berbagi ilmu, karena ilmu itu adalah bagaikan cahaya yang akan bisa menerangi manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Pandangan pada Media Massa dan Kebebasan Pers

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu obyektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya,

nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara materi media tersebut bisa memperoleh keuntungan.

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.

Media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan melalui media massa, baik yang positif maupun negatif akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga akan mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang dipublikasikan itu jujur dan objektif tentu sangat positif hasilnya bagi masyarakat. Sebaliknya manakala informasi yang dipublikasikan itu bohong, fitnah dan mengundang permusuhan, akan menimbulkan dampak negatif dan bahkan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Itulah sebabnya menurut John Hohenberg, bahwa berita di media massa harus selalu memperhatikan faktor aktualitas, kejujuran dan pendidikan. Dalam mengemban fungsi tersebut, maka tidak berlebihan kalau media massa disebut memiliki tugas luhur yang ikut andil dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berita yang disajikan oleh media massa dengan sendirinya akan menimbulkan opini yang bervariasi di tengah masyarakat. Karena setiap berita yang muncul di media, menurut William Rivers, bisa dipersepsi secara berbeda oleh masyarakat. Untuk itu agar opini masyarakat tidak salah persepsi pada sebuah pemberitaan, maka kata kuncinya perlu kejujuran bagi setiap wartawan dalam menyajikan berita.

Dalam rentang waktu peradaban manusia, pers merupakan salah satu bentuk sarana perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dikarenakan pers berfungsi

meyebarkan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.

Independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisasi media harus senantiasa dijaga agar citra wartawan di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu pers harus memiliki dan merealisasikan kode etik jurnalistik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari berbagai pihak. Kontrol dalam profesi kewartawanan tidak hanya sebatas tatkala melakukan liputan berita, namun juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen media. Kontrol bisa saja tidak perlu dilakukan ketika kode etik jurnalistik sudah dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap wartawan. Wartawan bagaikan seorang sopir yang berhak menentukan ke mana arah kendaraan akan dibawa. Begitu juga halnya wartawan, mereka mempunyai banyak informasi, sehingga merekalah yang mengolah informasi tersebut menjadi baik atau tidak, jujur atau bohong dan bahkan menjadi sumber fitnah.

Idealnya semua kode etik jurnalistik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan, berfungsi untuk menjamin berlakunya etika dan standar jurnalistik membuat media massa bertanggung jawab pada semua isi pemberitaan. Kode etik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang obyektif dari media massa. Dengan demikian kode etik jurnalistik sekaligus berfungsi sebagai payung hukum bagi wartawan dari segala macam risiko kekerasan atau intimidasi dari berbagai pihak.

Jika diamati lebih lanjut dan cermat, terjadinya kasus-kasus tindak pidana (delik) terhadap pers bukan semata-mata karena terbelenggunya hakikat kebebasan pers. Akan tetapi delik pers bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik oleh sebagian oknum wartawan. Pelanggaran juga tidak semata-mata dilakukan oleh wartawan, namun juga pemerintah dan masyarakat pun bisa terjebak di dalamnya.

Perkembangan media massa dewasa ini mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan tersebut telah mengantar masing-masing media berbenah dan berlomba-lomba menjadi yang

terbaik. Pengelola media berusaha maksimal untuk menjadi yang terbaik, baik dari aspek kuantitas dan juga kualitas. Salah satu sumber utama kemajuan media massa bisa dilihat dari perolehan iklan. Semakin banyak iklan yang diperoleh media tersebut, maka semakin kuatlah media tersebut. Sebab iklan adalah bagaikan nafas bagi media, sehingga media massa berusaha keras untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya. Selain iklan, media massa juga berjuang keras untuk meningkatkan tiras. Sebab jumlah tiras media ikut menentukan keuntungan materi yang diperoleh media tersebut. Kuatnya iklan dan juga tingginya tiras media tentu erat kaitannya dengan kualitas sebuah media. Media massa yang memiliki kualitas tinggi, biasanya akan mampu mendapat iklan yang besar sekaligus meraih tiras yang tinggi. Sebaliknya, media massa yang masih rendah kualitasnya, akan sulit mendapat iklan dan sulit meningkatkan tiras penjualan.

Walaupun iklan sangat penting dalam perkembangan media massa, tentu pengelola media massa harus tetap memperhatikan etika. Jangan sampai karena alasan komersial, iklan begitu saja ditampilkan dengan berbagai bentuk yang terkadang sangat tidak mendidik bagi masyarakat. Hendaknya sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang Pancasila dan religius, berita dan iklan yang dipublikasikan di media massa tetap memperhatikan nilai etika. Dengan demikian tugas media massa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud dengan baik.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan adalah profesi yang dituntut untuk mampu mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya, wartawan harus memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Tidak jarang, wartawan menghadapi resiko dan berbagai ancaman dalam menjalankan profesinya.

Kalau wartawan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada, tentu kualitas berita yang disajikan sangat berkualitas. Wartawan yang baik tentu akan selalu berusaha menyajikan berita dengan jujur, obyektif dan berimbang. Namun dalam realitanya, masih banyak wartawan yang menyimpang dari kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas kewartawanan. Ketika muncul berita bohong, fitnah, dan

menyesatkan tentu akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat bukannya mendapat pencerahan dari berita media, justru yang terjadi adalah penyesatan dan pembodohan. Untuk itu perlu terus dilakukan evaluasi kerja wartawan baik secara internal maupun eksternal, agar wartawan semakin berkualitas, dan bisa menyajikan berita yang mendidik dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Pada dasarnya dunia pers, sejak dari pers itu lahir sampai sekarang, telah mulai menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan. Seorang wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun sampai saat ini batasan makna profesionalitas itu masih belum jelas ukurannya. Walaupun demikian, ada beberapa dasar moral yang menjadi atribut profesionalisme bagi wartawan, diantaranya :

1. Otonomi dimaksudkan kebebasan melaksanakan pertim-bangan sendiri dan perkembangan suatu organisasi yang dapat mengatur diri sendiri.
2. Komitmen yaitu menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi.
3. Keahlian, yaitu menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial. Titik berat pada teknik intelektual, periode panjang daripada latihan khusus supaya memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasarkan penelitian.
4. Tanggungjawab, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban atau bertindak tanpa penuntunan dari atas, penciptaan serta penerapan suatu kode etik.³⁴

Atribut moral merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki wartawan. Dengan demikian, ketika jiwa dasar kewartawanan telah tertanam dengan baik, diharapkan masa depan pers Indonesia menjadi lebih maju. Namun aspek moral saja tidak cukup, wartawan Indonesia juga harus memiliki kecakapan intelektual. Dengan demikian antara kedua unsur tersebut bisa saling melengkapi.

³⁴Septiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), halaman 207

Jurnalistik senantiasa identik dengan dunia kewartawanan, karena sesungguhnya kedua istilah itu mengandung makna yang sama. Jurnalistik adalah nama bidang keilmuan tentang wartawan. Sedangkan wartawan adalah insan pers atau orang yang melaksanakan tugas jurnalistik. sepanjang sejarah pers di tanah air, wartawan sudah menunjukkan andil yang cukup besar dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Mereka bekerja dengan jujur, objektif dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.

Mochtar Lubis, dalam buku *wartawan dan komitmen Perjuangan*, menjelaskan bahwa kata kunci dari tugas luhur wartawan adalah pada aspek kejujuran. Wartawan harus senantiasa memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan profesinya. Karena tugas wartawan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, harus didukung oleh nilai kejujuran. Sekali wartawan menulis berita bohong, maka akan terjadilah penyesatan dan pembodohan yang luar biasa bagi masyarakat pembaca.³⁵

Dalam perkembangan berikutnya untuk meningkatkan kualitas wartawan dan pers Indonesia pada umumnya, disusunlah kode etik jurnalistik bagi insan pers. Kode etik ini diharapkan bisa menjadi acuan dan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugas kewartawanan. Kode etik jurnalistik menurut Rosihan Anwar, dalam buku *Bahasa Jurnalistik*, bisa menjadi alat kontrol bagi setiap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Sebab melalui kode etik jurnalistik tersebut wartawan bisa mengetahui dengan jelas aturan main dalam bidang kewartawanan.³⁶

Pers dalam perspektif Islam menurut Hamzah Ya'qub, dalam buku *Publisistik Islam* mengacu pada nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Kata kunci dari pers Islam itu adalah keteguhan dan komitmen yang kuat dalam menyajikan berita yang jujur dan benar. Sepanjang pers mampu menyajikan berita yang jujur dan benar, maka sesungguhnya ia sudah melakukan tugas

³⁵ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hal. 95

³⁶ Rosihan Anwar, *Bahasa Jurnalistik*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 63

dakwah. Namun ketika pers sudah mengabaikan nilai kejujuran dan kebenaran, maka pers tersebut tergolong menyesatkan dan membohongi masyarakat.³⁷

Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers sesungguhnya tidak ada pertentangan manakala dipahami secara utuh dan mendalam. Baik Djakfar H Assegaf dalam buku *jurnalistik Masa kini*, maupun Ashadi Siregar dalam buku *Menjadi Wartawan Profesional*, memberi pendapat yang sama tentang kebebasan pers. Keduanya sepakat bahwa kode etik jurnalistik adalah mendukung tumbuhnya kualitas wartawan. Kode etik jurnalistik ini juga menjadi rambu-rambu bagi wartawan.

Dalam setiap pembahasan tentang kode etik akan selalu diawali dengan pemahaman atas etika. Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah. Insan jurnalis mengungkapkan bahwa pers berfungsi sebagai alat menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin akurasi dan objektivitas dari setiap fakta yang disajikan memerlukan buku panduan etika (*Ethicc Handbook*) sebagai jalan mewujudkan seorang jurnalis yang profesional. Artinya, seorang jurnalis pada khususnya wartawan tidak bisa lepas dari tanggung jawab etika dan moral. Wartawan wajib menjalin hubungan baik dengan narasumber atau sumber berita.³⁸

Usaha untuk terus memperbaiki kode etik tidak hanya berhenti pada pertemuan Malang dan Jakarta. Namun demi untuk mendapatkan kode etik yang semakin baik dan berkualitas, perubahan demi perubahan terus dilakukan. Pertemuan berikutnya dalam upaya memperbaiki isi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dilakukan di Manado Sulawesi Utara, pada bulan November 1983 dalam forum kongres PWI. Selanjutnya diadakan lagi pertemuan di Batam pada tanggal 2 Desember 1994 dalam forum siding

³⁷ Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam, Sebuah Pengantar Bagi Penulis Pemula*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 86

³⁸ Hamzah Ya'qub, *Ibid*, hlm. 95

gabungan pengurus pusat PWI bersama badan pertimbangan dan pengawasan (BPP) PWI KEJ yang telah disemurnakan tersebut mulai dinyatakan berlaku secara resmi semenjak 1 Januari 1995.³⁹

Seiring munculnya era reformasi, tuntutan kebebasan pers pun semakin kuat dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan pengelola pers. Organisasi kewartawanan pun yang selama ini di dominasi PWI mulai menghadapi gugatan. Insan pers tidak lagi hanya diwadahi dalam satu organisasi wartawan PWI. Berbagai tuntutan pun muncul untuk mendirikan organisasi wartawan yang lain. Wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik berjuang untuk mendirikan organisasi kewartawanan baru di luar PWI. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan munculnya organisasi kewartawanan baru, seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Komite wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pekerja (FSP) dan masih banyak lagi organisasi wartawan lainnya. Menjamurnya organisasi kewartawanan itu karena euforia politik dalam kebebasan pers. Semangat kebebasan pers yang bergejolak di tengah membuat masyarakat begitu laah dalam mendirikan organisasi kewartawanan. Namun realitanya, secara kualitas, hanya PWI lah tampak tetap eksis dan memiliki program yang konkret di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh faktor pengalaman PWI yang sudah memiliki jam terbang cukup lama.

Akibat kemajuanteknologi dan polapikir manusia, berbagai masalah yang berkaitan dengan kode etik pun semakin kompleks. Persoalan tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat yang masih sering salah menilai profesi kewartawanan, namun dari lembaga pers sendiri sering melakukan kesalahan di tengah masyarakat. Apalagi dengan semakin menjamurnya wartawan

³⁹ Mafri Anir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 49

“bodrek” di tengah masyarakat, jelas sangat merugikan dan merusak citra wartawan di tengah masyarakat.

Kode etik jurnalistik merupakan kode etik wartawan Indonesia, merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa seorang wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik, sama halnya mereka belum mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat paturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka tergolong profesional dalam menjalankan tugas kewarta-wanan.

Kode etik sering kali tidak sama antara satu Negara dengan Negara lain. Sebab kode etik merupakan refleksi keadaan dan tradisi yang berkembang di setiap Negara. Lebih khusus biasanya kode etik terkonsentrasi pada informasi yang reliable dan menghindari distorsi, penindasan, sensasionisme, dan secara luas akan berkaitan dengan pandangan peran jurnalis di tengah masyarakat.

Dalam tataran realitas, kode etik juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum wartawan dalam usaha komersialisasi. Tindakan memeras sumber berita sering dilakukan wartawan yang tidak memiliki etika jurnalistik. Ulah sebagian wartawan yang demikian jelas sangat monodai citra wartawan. Berbagai penyimpangan disadari sering dilakukan wartawan, baik dalam pembentuk pemberitaan maupun penyajian foto-foto jurnalistik. Apalagi di era kebebasan pers saat ini, begitu sering terjadi berita bohong hingga foto-foto vulgar yang cenderung merusak moral masyarakat. Ini semua menjadi tantangan bagi insan pers dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa lembaga pers terus berusaha memperbaiki citra wartawan di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh pers Indonesia yang mayoritas muslim selalu berusaha memasukkan nilai-nilai Islam dalam kode etik jurnalistik. Hal ini dimaksudkan agar wartawan Indonesia bisa memiliki etika

yang baik dalam menjalankan tugas kewartawanan. Di tengah banyaknya tantangan moral dalam sajian pers dewasa ini, membuat semakin pentingnya meningkatkan aktualisasi etika dalam profesi kewartawanan. Usaha penguatan etika tersebut tidak hanya sebatas teori dalam kode etik jurnalistik, namun para wartawan juga membentuk wadah persatuan wartawan muslim Indonesia sebagai bukti komitmen pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Idealnya semua kode etik jurnalistik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan, berfungsi untuk menjamin berlakunya etika dan standar jurnalistik yang profesional serta membuat media massa bertanggung jawab pada semua isi pemberitaan. Selanjutnya kode etik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang obyektif dari media massa. Dengan demikian kode etik jurnalistik sekaligus berfungsi sebagai payung hukum bagi wartawan dari segala macam resiko kekerasan atau intimidasi dari berbagai pihak.

Kalau diamati lebih lanjut dan cermat, terjadinya kasus-kasus tindak pidana (delik) terhadap pers bukan semata-mata karena terbelenggunya hakekat kebebasan pers. Akan tetapi delik pers bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik oleh sebagian oknum wartawan. Pelanggaran juga tidak semata-mata dilakukan oleh wartawan, namun juga pemerintah dan masyarakat pun bisa terjebak di dalamnya.

Perkembangan media massa dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut telah mengantar masing-masing media berbenah dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Pengelola media berusaha maksimal untuk menjadi yang terbaik, baik dari aspek kuantitas dan juga kualitas. Salah satu sumber utama kemajuan media massa bisa dilihat dari peroleh iklan. Semakin banyak iklan yang diperoleh media tersebut, maka semakin kuatlah media tersebut. Sebab iklan adalah bagaikan nafas bagi media, sehingga tidak bisa tidak, kalau ingin eksis, maka media massa berusaha keras untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya. Selain iklan, media massa juga berjuang

keras untuk meningkatkan oplah. Sebab bagaimana pun jumlah oplah media ikut menentukan keuntungan materi yang diperoleh media tersebut. Kuatnya iklan dan juga tingginya oplah media tentu erat kaitannya dengan kualitas sebuah media. Media massa yang memiliki kualitas tinggi, biasanya akan mampu mendapat iklan yang besar sekaligus meraih oplah yang tinggi. Sebaliknya, media massa yang masih rendah kualitasnya, akan sulit mendapat iklan dan sulit meningkatkan oplah penjualan.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan juga bisa diartikan sebuah profesi yang dituntut untuk mampu mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya, wartawan harus memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Tidak jarang, wartawan menghadapi resiko dan berbagai ancaman dalam menjalankan profesinya. Udin adalah salah satu contoh wartawan yang menjadi korban dalam menjalankan tugas kewartawanan. Wartawan Bernas Yogyakarta itu pada tahun 1996 yang lalu dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab akibat berita yang ditulis Udin di harian Bernas. Waktu itu Udin sebagai wartawan ingin menyempikan kejujuran dan kebenaran terkait dengan dugaan kasus korupsi di Pemda Bantul yang melibatkan Bupati Bantul waktu itu. Akibat keberaniannya menyampaikan berita tersebut, ia akhirnya menjadi korban. Hingga saat ini kasus pembunuhan Udin masih misterius, karena tidak jelas siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan tersebut.

Rosihan Anwar menjelaskan, bahwa wartawan sejati adalah mereka yang memiliki kejujuran, keberanian, keuletan dan tidak mengenal lelah. Jiwa wartawan tidak mau berhenti mencari kebenaran. Sebab mencari kebenaran adalah ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Sebelum jerami ditemukan, terlebih dahulu dengan susah payah harus mampu mengoyak tumpukan terami tersebut. Karena sulitnya mengoyak jerami tersebut, tidak jarang pelaku (wartawan) mati kelelahan. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, sebuah kebenaran akan muncul dengan usaha dan kerja keras. Bagaimana pun juga,

Kalau wartawan selalu memiliki komitmen pada kebenaran dan kejujuran, maka citra wartawan akan semakin baik dan harum di tengah masyarakat.⁴⁰

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bagaimana pengertian kode etik jurnalistik. Dari penjelasan tersebut tampaknya bahwa kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang penting bagi wartawan agar tidak terjebak kepada pelanggaran atas norma-norma aturan yang lebih tinggi. Sekarang, pada bagian ini kita lihat bagaimana fungsi dan peran kode etik jurnalistik bagi profesi seorang wartawan.

Kode etik jurnalistik yang merupakan pengganti dari kode etik wartawan Indonesia, merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Artinya kode etik jurnalistik adalah standar norma-norma yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam berbuat, bertindak dan berperilaku ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan. Secara sederhana dapat dipahami, seorang wartawan yang tidak memahami kode etik profesinya dinilai tidak mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa tunduk kepada kode etik yang berlaku dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban media pers, wartawan dan konsumen media.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh seorang wartawan sendiri melalui kongres. Hal ini menunjukkan adanya suatu kesadaran yang datang dari hati nurani wartawan untuk mengatur dirinya sendiri. Wartawan Indonesia sadar, dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak mengandung resiko baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers (konsumen media). Untuk menghindari itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar kegiatan kewartawanan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Yakni kode etik jurnalistik.

Kode etik seringkali tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya, mengingat kode etik merupakan refleksi keadaan dan tradisi yang berkembang di sebuah negara tersebut. Lebih khusus, biasanya kode etik terkonsentrasi pada informasi yang reliabel dan menghindari distorsi, penindasan, bias sensasionalisme, invasi, privasi dan secara luas akan berkaitan

⁴⁰ Rosihan Anwar, loc cit, hlm. 12

dengan pandangan peran jurnalis di tengah masyarakat. Secara umum, jurnalistik dalam industri televisi," memaparkan, prinsip kode etik jurnalistik mengandung enam point, yakni:

1. Kebenaran (*truthfulness*) informasi
2. Kejelasan (*clarity*) informasi
3. Pembelaan atas hak publik
4. Responsibilitas dalam pembentukan opinion publik
5. Standar pengumpulan dan penyiaran informasi
6. Respek pada integritas sumber.⁴¹

Enam prinsip kode etik jurnalistik itu, merupakan acuan dasar yang harus dipegang oleh setiap organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers sebelum merumuskan sebuah kode etik profesinya. Sehingga konsep etika jurnalistik yang dilahirkan nantinya akan berperan pandangan hidup wartawan, bukan sebagai pelindung wartawan dari jeratan hukum.

Dalam tataran realitas, kode etik juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum wartawan dalam usaha peliputan berita. Dengan dalih kebebasan pers, wartawan menyajikan berita sekehendak dirinya sendiri tanpa aturan.

Agar tetap terjaga independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisme media, maka pers harus menerapkan kode etik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari jurnalis tersebut. Kontrol artinya tidak hanya sebatas ketika melakukan peliputan saja, namun kontrol juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen pers. Kontrol tidak perlu dilakukan, ketika kode etik jurnalistik sudah dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing wartawan. Wartawan ibarat seorang sopir bis, ke mana sopir bis itu membelok maka bis tersebut pun akan mengarah ke arah yang sama. Begitupun wartawan, mereka mempunyai segudang informasi, bagaimana informasi itu diolah maka hasilnya persis sebagaimana yang dikehendaki wartawan tersebut.

Idealnya, semua kode etik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan itu berfungsi menjamin berlakunya etika dan

⁴¹ Ermanto, loc cit, hlm. 217

standar jurnalis profesional serta media yang bertanggung jawab. Nantinya, kode etik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang obyektif di media massa, sebagai payung hukum bagi wartawan dari segala macam resiko kekerasan atau intimidasi dari pihak luar dan sekaligus merupakan alat kontrol bagi pemerintah, pelaku media, dan masyarakat.

Wartawan sesungguhnya bebas membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila. Jika semua pelaku media patuh pada kode etik yang telah berlaku dan disepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau peraturan khusus. Dengan demikian, fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial benar-benar terwujud di bumi Indonesia.

Sebenarnya, jika ditelaah lebih dalam, terjadinya tindak pidana (delik) terhadap pers bukan semata-mata terbeleng-gunya hakekat kebebasan pers. Akan tetapi, delik pers bisa terjadi karena pertama-tama dilakukan oleh wartawan, namun pemerintah dan masyarakat pun bisa berperan dalam terjadinya delik pers.

Perkembangan media massa dewasa ini mengalami kemajuan sangat pesat. Kemajuan tersebut telah mengantarkan masing-masing media berbenah dan berlomba menjadi yang terbaik. Terbaik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh, dari segi kuantitas semua media bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar, meningkatkan penjualan dan iklan sebagai omzet perusahaan. Sementara dari segi kualitas media berlomba-lomba menjadi yang terbaik dari segi peliputan dan penyajian berita, pemilihan topik, visi dan misi, termasuk peningkatan mutu sumber daya wartawan.

Wartawan yang baik adalah yang mampu mencium berita dari balik dinding, wartawan harus peka dalam setiap peristiwa, dia mampu memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Tetapi langkah kaki menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan kreativitas menulis adalah kunci akhir keberhasilan wartawan. Ia harus mengenali setiap peristiwa dan memandang

peristiwa tersebut dari berbagai arah. Rosihan Anwar, seorang wartawan senior dalam bukunya "Profil Wartawan Indonesia" mengemukakan empat dasar yang melekat dalam diri wartawan yaitu :

1. tidak pernah berhenti mencari kebenaran.
2. Maju terus menghadapi zaman yang berubah dan jangan menunggu sampai dikuasai olehnya.
3. Melaksanakan jasa-jasa yang berarti dan ada konsekuensinya bagi umat manusia.
4. Memelihara kebebasan yang tetap teguh.⁴²

Sungguh ideal konsep yang ditawarkan oleh seorang Rosihan Anwar, adanya jiwa wartawan yang tidak mau berhenti mencari kebenaran saat ini memang sulit. Bagaimana tidak, mencari kebenaran ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Sebelum jarum itu ditemukan, terlebih dahulu kita dengan susah payah harus mampu mengoyak tumpukan jerami tersebut. Bahkan karena sulitnya mengoyak jerami itu, tidak jarang pelaku (wartawan) mati kelelahan. Akan tetapi, kita tidak perlu khawatir, sebuah kebenaran akan muncul dengan usaha dan kerja keras, bagaimanapun jika keempat dasar wartawan yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan pers akan segera terlaksana.

Pada dasarnya dunia pers (jurnalisme), dari sejak pers itu lahir sampai sekarang, telah mulai menuntut kompetensi tertentu bagi profesi wartawan. Yakni, seorang wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan profesinya. Loyalitas dan disiplin adalah kunci bagi tercapainya profesionalisme wartawan. Akan tetapi sampai saat ini batasan makna profesionalisme masih belum jelas.

Atribut moral merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki wartawan, dengan demikian, ketika jiwa dasar kewartawanan telah tertanam dengan baik, diharapkan masa depan pers Indonesia menjadi lebih maju. Tetapi aspek moral saja tidak cukup, wartawan Indonesia juga harus memiliki kecakapan intelektual. Sehingga antara kedua unsur tersebut bisa

⁴² Rosihan Anwar, loc cit, hlm. 88

saling melengkapi. Lebih lanjut Septiawan Santana menjelaskan bahwa ada sepuluh ciri intelektual profesionalisme jurnalis di era milenium ini :

1. *Writing competencies* ialah kapasitas untuk melaporkan secara akurat jelas, kredibel dan reliabel. Kemampuan menulis yang mudah dipahami pembaca.
2. *Oral performance competencies* yakni kemampuan menyampaikan pengertian, respons yang baik, secara percaya diri dan bertanggung jawab.
3. *Research and investigative competencies* adalah kemampuan menyiapkan berbagai bahan, pengembangan, akurasi kisah atau mengidentifikasi topic-topic potensial.
4. *broad-based knowledge competencies* ialah kemampuan memiliki pengetahuan dasar seperti ekonomi, statistik, sejarah, sains, perawatan kesehatan, bisnis dan struktur pemerintahan.
5. *Web-Based Competencies* yaitu kemampuan menguasai *internet, e-mail, mailing list, newgroups*, dan pemberitaan dalam format *on the web*.
6. *Audio Visual Competencies* adalah kemampuan menggunakan peralatan seperti kamera 55 mm, kamera video, men-scan foto dalam komputer, serta audio tape recorder.
7. *Skill-Based Computer Application Competencies* ialah kemampuan mengaplikasikan komputer dalam kegiatan melaporkan pemberitaan; seperti *word processing*, pengembangan *database* (terutama bagi *investigative report*) dan aplikasi multimedia, termasuk *pagemaker, Quark Xpress*, dan *Printshop*.
8. *Ethics Competencies* yaitu kemampuan memahami tanggung jawab profesi, seperti; kode etik.
9. *Legal Competencies* yakni kemampuan memahami ihwal undang-undang kebebasan berpendapat, seperti *The Freedom of Information Act (FOIA) The First Amendment*, hak cipta dan sebagainya.
10. *Career Competencies* adalah kemampuan memahami dunia karir profesional dalam jurnalisme. Kemampuan

bekerja di dalam manajemen pers, dan bersikap positif di dalam kerja peliputan.⁴³

Tuntutan profesionalisme terhadap para wartawan, bukan hanya berupa ketekunan bekerja, kecakapan intelektual, penguasaan pers, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dia berupaya penyajian fakta kemudian mempertanggungjawabkannya kepada pembaca. Para wartawan dituntut bukan hanya menyajikan fakta, melainkan juga menjaga kebenaran tentang fakta itu.

Tetapi lahirnya wartawan yang bekerja dengan standar profesional memang sulit. Bagaimana tidak, adanya sebutan wartawan "bodrek" atau "preman" adalah salah satu kendala yang melandasinya. Wartawan "bodrek" atau "preman" adalah sekumpulan wartawan yang datang dalam acara yang diselenggarakan suatu perusahaan, instansi atau datang secara lepas, seolah-olah mencari informasi, tetapi ujung-ujungnya minta duit.

Masalah lainnya, berkaitan dengan wartawan "bodrek" juga menimpa jurnalis di daerah konflik, Serambi Makkah, Aceh. Banyak wartawan yang masih merangkap Pegawai Negeri Sipil (PNS), kontraktor, agen proyek, broker suksesi, bahkan disinyalir ada yang suka memeras pengusaha dan pejabat. Ulah meresahkan wartawan "bodrek" semacam itu menyebabkan nilai *bergaining* umumnya wartawan menjadi rendah di mata publik. Sehingga banyak pihak yang menyangka semua wartawan dapat "diatur" seperti dihendaki oleh narasumber.

Ironisnya, adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam tubuh wartawan, konsumen media (masyarakat) sering mengklasifikasikan seolah-olah semua wartawan bersikap demikian. Padahal ada ratusan media pers dan ribuan bahkan ratusan ribu wartawanya, jika satu, dua atau tiga menjadi wartawan "bodrek" tentulah tidak proporsional untuk menjadikan penyimpul atas keberadaan wartawan Indonesia.

Masalah munculnya wartawan "bodrek", menurut

⁴³ Septiawan Santana, loc cit, hlm. 128

Ashadi Siregar dapat dilihat dari dua sisi, yakni secara makro dan mikro. Secara mikro adalah berkaitan dengan adanya kesenjangan di antara perusahaan pers. Kesenjangan ini, dengan sendirinya akan membedakan pula perlakuan manajemen perusahaan terhadap wartawannya. Sementara secara personal, mengenai penghargaan atas profesi sekaligus dirinya. Pertama keterampilan dan kualifikasi yang standar, dan kedua orientasi etos kerja dalam menjalankan suatu instansi sosial. Dua masalah di atas merupakan problem akut pada kebanyakan perusahaan pers.

Dengan demikian, wartawan yang patuh pada standar profesi, yang berusaha menghasilkan pelaporan yang akurat dengan cara etis, pasti memperoleh kepuasan profesional. Sehingga wartawan akan memperoleh kepercayaan dari pembaca dan konsumen media. Akhirnya, secara tidak langsung hal itu dapat meningkatkan reputasi keterandalan organisasi berita mereka. Kemudian kepercayaan dari masyarakat tersebut akan berdampak pada kemajuan surat kabar, stasiun radio, dan akan mempunyai peluang sangat besar untuk sukses secara komersial. Jadi selain dorongan moral untuk mempraktikkan jurnalisme yang beretika, juga ada pendorong ekonomi.

Melihat tugas wartawan yang sangat berat, dan persaingan media semakin ketat, hal ini menuntut kegigihan dan keberanian wartawan. Dengan demikian, persyaratan minimum yang harus dimiliki wartawan sebelum melakukan profesinya adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kewartawanan yang kadang-kadang menimbulkan frustrasi dan yang sering tidak banyak imbalannya.

H. Kepemimpinan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Setelah menyelesaikan program doktor di Kanada, Faisal Ismail kembali ke Yogyakarta dan menjabat sebagai asisten direktur II Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga selama sembilan bulan (Mei 1996 – Februari 1997). Dari Februari 1997 s/d Februari 2000, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama tiga bulan (Maret s/d

Mei 2000) ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam kapasitasnya sebagai direktur Pascasarjana dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, ia secara otomatis menjadi anggota senat universitas.⁴⁴

Faisal Ismail tergolong direktur yang paling singkat masa kepemimpinannya di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, karena hanya tiga bulan. Dalam waktu yang cukup singkat itu tentu bisa dimaklumi tidak banyak kebijakan dan terobosan yang bisa dilaksanakan. Sebagai abdi negara, Faisal Ismail harus siap mengemban tugas yang lebih besar dari Menteri Agama RI, untuk menjadi Kepala Litbang dan Diklat Keagamaan di Kementerian Agama RI Jakarta. Selanjutnya, Faisal Ismail juga dipercaya negara menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, jabatan yang cukup strategis dalam menentukan kemajuan Kementerian Agama. Waktu yang hanya tiga bulan menjabat sebagai direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan Faisal untuk menjalankan program yang dirintis direktur sebelumnya. Kebijakan-kebijakan tersebut secara umum menyangkut tentang kurikulum Pascasarjana, sistem pengajaran, kualitas tenaga pengajar, perikutan mahasiswa Pascasarjana, bimbingan tesis, hingga kebijakan tentang masa studi mahasiswa di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.⁴⁵

Kesempatan menjadi direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan waktu hanya tiga bulan menurut Faisal sangat pendek, sehingga tidak banyak program yang bisa dijalankan. Ini tentu tidak lepas dari adanya tugas lain yang lebih berat dan harus diemban sebagai abdi negara. Namun yang jelas menurut Faisal Ismail, dengan adanya sistem yang jelas di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, semua program bisa berjalan baik asal ada koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Karena kata kunci keberhasilan manajemen adalah terwujudnya kerjasama yang baik antara semua pihak. Apa pun posisi yang dijalankan seseorang tentu sangat penting fungsinya untuk

⁴⁴ Dokumentasi Faisal Ismail tahun 2008

⁴⁵ Wawancara dengan Faisal Ismail, tgl 26 September 2013

memajukan sebuah organisasi. Kerjasama yang baik dengan semua pihak, mulai dari direktur, asisten direktur, dosen, mahasiswa, bagian administrasi, petugas perpustakaan, sopir hingga bagian kebersihan, sangat menentukan kemajuan Pascasarjana.⁴⁶

Pandangan Faisal Ismail yang demikian dalam menjalankan manajemen organisasi tentu sangat positif dalam usaha memajukan lembaga yang dipimpin. Dengan demikian walaupun dalam waktu hanya tiga bulan menjadi direktur Pascasarjana, sistem yang sudah ada selama ini bisa berjalan dengan baik. Sistem pengajaran di pascasarjana, pengelolaan administrasi, pelayanan perpustakaan, pelayanan mahasiswa dalam menulis tesis, semua tertata dengan baik. Pergantian pimpinan (direktur) di pascasarjana tidak menjadi penghambat dalam pengelolaan akademik. Dari sekian banyak sistem dan program yang dibuat oleh pascasarjana dalam meningkatkan kualitas akademik, tentu yang lebih utama menurut Faisal Ismail adalah keteladanan dari pemimpin. Ketika seorang pemimpin mampu menjadi teladan bagi kolega dan bawahannya, maka berbagai kebijakan yang dibuat akan mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga membuat kebijaksanaan tersebut membuahkan hasil yang maksimal. Keteladanan itu bisa dalam bentuk ucapan dan tindakan, dimana seorang pemimpin harus jujur, disiplin, dan bisa menjadi teladan bagi orang lain.⁴⁷

Pascasarjana sebagai lembaga pendidikan tinggi tentu mengemban tugas mulia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai amanat undang-undang, pendidikan di Pascasarjana UIN pun harus dikelola dengan baik dan maksimal, sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dan pada akhirnya mereka bisa mengabdikan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan agama. Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan ummat manusia. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termaktub dalam pasal 1, pengertian pendidikan adalah sebagai berikut:

⁴⁶Wawancara dengan Faisal Ismail, tgl 30 Agustus 2013

⁴⁷Wawancara dengan Faisal Ismail, tgl 30 Agustus 2013

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.⁴⁸

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, Faisal Ismail dalam mengemban tugas sebagai direktur pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, sudah berusaha keras, walaupun hanya dalam waktu tiga bulan untuk menjalankan proses pendidikan yang berkualitas. Sistem perkuliahan di Pascasarjana dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat direktur sebelumnya. Dalam rangka perikrutan mahasiswa, pascasarjana UIN tentu harus dipromosikan kepada masyarakat luas dengan membuat brosur, yang menyajikan informasi tentang program studi yang ditawarkan, visi misi masing-masing prodi, hingga daftar dosen yang mengajar di pascasarjana UIN Sunan kalijaga. Dengan informasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas bagaimana potret kampus ini, sehingga mereka yang masuk menjadi mahasiswa di Pascasarjana UIN Suka sudah lebih dahulu mendapatkan informasi yang utuh.

Agar kualitas mahasiswa di Pascasarjana UIN tetap terjaga kualitas akademiknya, setiap tahun diadakan seleksi mahasiswa, sehingga mereka yang diterima menjadi mahasiswa, sudah memiliki standar yang ada di Pascasarjana. Demikian pula dari aspek manajemen keuangan, pascasarjana UIN Sunan kalijaga menawarkan biaya kuliah yang tergolong murah, sehingga bisa terjangkau oleh putra putri bangsa yang mau menuntut ilmu di kampus ini. Sebagian besar mahasiswa pascasarjana UIN Sunan kalijaga dari aspek pendanaan adalah biaya sendiri, sehingga harus ada kebijakan yang “pro rakyat” dengan menawarkan SPP murah. Namun demikian pascasarjana UIN juga membuka

⁴⁸ UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

peluang beasiswa bagi mahasiswa lewat kerjasama dengan Kementerian Agama. Mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut tentu dengan persyaratan yang sudah ada dan mengikuti seleksi.⁴⁹

Kebijakan berikutnya terkait dengan pengelolaan pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada masa kepemimpinan Faisal Ismail adalah menjaga kualitas dosen. Dalam hal ini, pascasarjana berusaha maksimal menghadirkan dosen yang berkualitas dengan tingkat pendidikan dosen yang sudah bergelar Doktor. Sebagaimana kebijakan dirktur sebelumnya, Faisal Ismail juga meneruskan kebijakan tentang peningkatan kualitas akademik di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Semua dosen UIN Sunan Kalijaga yang sudah bergelar Doktor diberi kesempatan untuk ikut menjadi dosen di Pascasarjana. Namun karena jumlah dosen UIN Sunan Kalijaga yang bergelar doktor waktu itu masih terbatas, maka dibuat kebijakan dengan menghadirkan dosen yang bergelar doktor dari kampus lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Para dosen tersebut diberi tugas mengajar sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan demikian kualitas akademik di Pascasarjana UIN diharapkan bisa menjadi lebih baik. Untuk menjaga kualitas akademik di pascasarjana, para dosen yang ikut mengajar tentu harus diberi honor dan transportasi yang layak, sehingga mereka benar-benar bersemangat untuk mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini. Kebijakan untuk memberi honor yang layak kepada dosen pascasarjana adalah bagian dari manajemen yang pokok dalam rangka meningkatkan kualitas akademik.

Dalam bidang pelayanan administrasi mahasiswa, pada masa kepemimpinan Faisal Ismail, juga berjalan normal sebagaimana yang sudah ada pada periode sebelumnya. Mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah seminar proposal diberi kesempatan untuk segera mengajukan judul tesis, dan lewat prodi ditetapkan siapa dosen yang menjadi pembimbing

⁴⁹Wawancara dengan Faisal Ismail, tgl 13 September 2013

tesis. Lewat tenaga administrasi di prodi masing-masing dibuat surat resmi kepada dosen pembimbing agar proses penulisan tesis mahasiswa bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Kebijakan pascasarjana UIN mengharapkan mahasiswa bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu, agar mereka jangan sampai rugi dari aspek waktu dan biaya. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pascasarjana menyediakan berbagai fasilitas, mulai dosen pembimbing, perpustakaan, hingga surat panggilan bagi mahasiswa yang dianggap terlambat menyelesaikan studi.⁵⁰

Perpustakaan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada periode Faisal Ismail dikelola dengan baik. Perpustakaan sebagai bagian penting dalam pengembangan akademik dan menunjang kemajuan proses belajar mahasiswa. Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dilengkapi dengan koleksi buku yang cukup memadai, tentang kajian keislaman, hukum, pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Buku-buku koleksi yang ada di Pascasarjana UIN juga dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Perancis, dan Jerman. Selain koleksi buku, di perpustakaan Pascasarjana UIN juga ada majalah dan surat kabar. Berbagai fasilitas yang disediakan perpustakaan Pascasarjana ini sangat membantu bagi mahasiswa dalam pengembangan akademik. Apalagi pelayanan ruang perpustakaan sangat memuaskan, baik dari segi waktu dan juga suasana ruangan yang cukup nyaman.⁵¹

Menurut pak Joko yang pernah menjadi pegawai administrasi Pascasarjana pada masa kepemimpinan Faisal Ismail, perhatian Faisal Ismail kepada bawahan termasuk tenaga administrasi cukup baik dan ramah. Faisal Ismail sering menyapa pegawai dengan senyum, dan menanyakan apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan.⁵² Pernyataan pak Joko tersebut

⁵⁰Wawancara dengan pak Joko (mantan pegawai administrasi Pascasarjana UIN Suka) tgl 21 Oktober 2013

⁵¹Wawancara dengan Arifin (mahasiswa Pasacasarjana UIN Suka) tgl 18 Oktober 2013

⁵²Wawancara dengan pak Joko (mantan pegawai Pascasarjana UIN Suka) tgl. 15 Oktober 2013.

sesungguhnya merupakan bagian penting dalam manajemen kepemimpinan. Seorang pemimpin, apakah ia memimpin dalam waktu yang cukup lama atau waktu singkat, kata kunci kesuksesan adalah keramahan dengan bawahan. Ketika seorang pemimpin ramah dengan bawahan akan membuat pekerjaan bisa dengan mudah diselesaikan. Kalau bawahan merasa nyaman dengan seorang pemimpin, maka mereka pun akan bekerja keras untuk mendukung program yang dibuat pemimpin tersebut. Barangkali inilah kata kunci kesuksesan Faisal Ismail dalam memimpin termasuk memimpin Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga walaupun hanya dalam waktu singkat.

Teladan keramahan, senyum, terbuka pada bawahan, mau mendatangi bawahan, dan mengajak mereka berbicara merupakan bagian penting dalam manajemen kepemimpinan. Ditambah lagi dengan kerendahan hati yang biasa ditunjukkan Faisal Ismail kepada kolega dan bawahannya, membuat model kepemimpinan Faisal Ismail disukai banyak orang. Menurut pak Joko, yang lebih menarik lagi dari Faisal Ismail adalah kejujuran dan kedisiplinan yang ditunjukkan. Faisal Ismail sangat disiplin dengan waktu, yang ditunjukkan dengan kehadiran di kantor pascasarjana tepat waktu, dan pulang juga tepat waktu.⁵³

Terkait dengan kedisiplinan waktu yang ditunjukkan Faisal Ismail sebagaimana diakui oleh pak Joko memang suatu yang asing lagi. Soal kedisiplinan waktu tersebut sudah bagian hidup Faisal Ismail dimana pun ia ditugas. Artinya kedisiplinan tersebut tidak hanya ditunjukkan Faisal Ismail ketika menjadi direktur Pascasarjana UIN Suka, namun di tempat lain pun demikian. Ketika ia menjadi dekan Fakultas Dakwah, kedisiplinan waktu tetap ditunjukkan, ketika memberi kuliah kepada mahasiswa, ia juga sangat disiplin. Barangkali karena teladan kedisiplinan itu pulalah, ia dipercaya oleh pemerintah untuk mengemban tugas yang lebih besar, menjadi kepala Litbang Kemenag RI, Sekjen Kemenag RI, Staf Ahli Menteri Agama, hingga Duta Besar RI di Kuwait dan Bahrain.

⁵³Wawancara dengan pak Joko (mantan pegawai Pascasarjana UIN Suka) tgl 15 Oktober 2013.

Pengakuan yang hampir sama juga datang dari Ahmad Fauzi, alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang pernah merasakan kepemimpinan Faisal Ismail. Ia mengatakan, sewaktu kepemimpinan Faisal Ismail di Pascasarjana UIN Suka, ia mendapatkan suasana yang cukup baik, tidak ada gejolak, semua berjalan dengan baik. Kalau ada mahasiswa yang ingin bertemu dengan Faisal Ismail sebagai direktur Pascasarjana untuk membicarakan masalah yang dihadapi mahasiswa, akan diterima dengan baik. Lewat diskusi tersebut suasananya nyaman, dan ada solusi yang diberikan.⁵⁴

Keterbukaan dan keramahan dengan mahasiswa menjadi ciri khas yang tak terpisahkan dari profil Faisal Ismail. Pengakuan mahasiswa pascasarjana tersebut di atas memperkuat bukti, bahwa jabatan apa pun yang dijalankan Faisal Ismail tidak membuat keramahannya dengan orang lain berubah. Terlebih dengan mahasiswa sebagai teman diskusi, Faisal Ismail begitu senang menerima kehadiran mereka. Karena bagi Faisal Ismail berdiskusi dengan mahasiswa, berarti mengasah wawasan akademik, dan pada akhirnya akan bisa diperoleh berbagai informasi, termasuk problem-problem akademik yang dihadapi mahasiswa.

Semangat akademik Faisal Ismail tidak pernah surut walaupun ia menjabat direktur Pascasarjana. Ia menyempatkan diri untuk membimbing tesis mahasiswa S2 UGM di tengah kesibukannya sebagai direktur Pascasarjana UIN Suka. Ia juga terus menulis buku, menulis di jurnal ilmiah, dan juga menulis artikel di berbagai media massa. Inilah yang membedakan model kepemimpinan Faisal Ismail dengan kebanyakan pemimpin birokrat yang lain. Kebanyakan pemimpin birokrat, terlalu sibuk dengan tugas-tugas rutin yang melekat dengan jabatannya, sehingga mereka tidak menyisakan waktu lagi untuk membuat karya ilmiah. Namun hal ini berbeda dengan Faisal Ismail. Sesibuk apa pun tugas yang diembannya dalam birokrasi (termasuk jabatan direktur Pascasarjana UIN Suka), ia tetap menyempatkan

⁵⁴Wawancara dengan Ahmad Fauzi (alumni Pascasarjana UIN Suka) tgl 4 September 2013

diri untuk menulis buku, menulis di jurnal ilmiah dan menulis artikel di media massa. Sungguh teladan yang luar biasa bagi para akademisi yang kebetulan mendapat tugas tambahan sebagai pejabat.

Selama tiga bulan menjabat direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Faisal Ismail dengan sungguh-sungguh mengemban jabatan tersebut. Suasana akademik kampus diperhatikan dengan baik, mulai dari kegiatan perkuliahan, pelayanan administrasi, perpustakaan, hingga memperhatikan berbagai keluhan mahasiswa. Untuk menjalankan tugas dengan baik, ia melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, sehingga kegiatan pascasarjana bisa berjalan dengan baik. Jadwal perkuliahan disusun dengan tertib, disesuaikan dengan ruang kelas yang ada di Pascasarjana UIN Suka. Demikian pula dengan daftar kehadiran dosen dan mahasiswa ditertibkan agar aktivitas perkuliahan bisa dikontrol.

Perhatian Faisal Ismail juga cukup besar pada perpustakaan Pascasarjana UIN Suka, karena kehadiran perpustakaan sangat penting dalam rangka membangun budaya akademik di lingkungan kampus. Sebagai direktur, Faisal Ismail mendiskusikan dengan pengelola perpustakaan agar koleksi buku diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pelayanan di perpustakaan, ia menyarankan agar diberi pelayanan yang prima kepada mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung kesuksesan studi di pascasarjana UIN Suka.

I. Profil Akademik dan Pengalaman Kerja

Sebelum memulai program MA-nya, Faisal Ismail mengikuti kursus intensif Bahasa Inggris di English Program for Internationals (EPI), University of South Carolina, Amerika Serikat, kemudian melanjutkan pelatihan Bahasa Inggris di American Language Program (ALP), Columbia University, Newyork. Di bawah Program McGill – Indonesia IAIJ Development Project, pada September 1991 ia memulai program

doktornya di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal Canada, dan menyelesaikannya pada Desember 1995. Faisal Ismail tercatat sebagai doktor dan profesor pertama yang lulusan barat di UIN Sunan Kalijaga.⁵⁵

Apalagi bagi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, kehadiran Faisal Ismail dengan gelar doktor yang diraih dari Kanada sungguh merupakan kebanggaan yang luar biasa. Karena selama ini, diantara fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah tergolong fakultas yang tertinggal dalam perkembangan akademik, terutama dalam aspek dosen yang bergelar doktor. Ketika fakultas lain sudah ada beberapa dosennya yang bergelar doktor dan profesor, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga baru memiliki dosen yang bergelar doktor dengan kehadiran Faisal Ismail. Prestasi akademik luar biasa yang diraih Faisal Ismail itu dengan sendirinya membuat karir akademiknya pun berkembang pesat. Dalam perkembangan berikutnya, ia pun diberi amanah untuk menjadi asisten direktur II di Pascasarjana UIN Suka, disusul menjadi Dekan Fakultas Dakwah, Direktur Pascasarjana UIN Suka, Kepala Litbang Kemanag RI, Sekretaris Jenderal Kemenag RI, staf ahli Menteri Agama, hingga menjadi duta besar RI di Kuwait dan Bahrain.

Bagi Fakultas Dakwah UIN Suka, kesuksesan karir yang diraih Faisal Ismail adalah merupakan kebanggaan yang luar biasa, sekaligus menjadi kerugian besar. Bangga karena dosen Fakultas Dakwah UIN Suka bisa meraih karir yang sangat cemerlang sampai menjadi Sekretaris Jenderal Kemenag RI. Namun di sisi lain mendapat kerugian besar, karena satu-satunya waktu itu dosen fakultas dakwah yang bergelar profesor doktor meninggalkan Fakultas Dakwah. Padahal idealnya sebuah fakultas yang berkualitas harus memiliki dosen yang bergelar doktor dan profesor. Barangkali inilah kelemahan Fakultas Dakwah selama ini yang sangat terlambat dalam kaderisasi peningkatan pendidikan dosen, sehingga kebanyakan dosen Fakultas Dakwah hanya bergelar magister. Budaya akademik di Fakultas Dakwah tergolong rendah, sehingga begitu langka

⁵⁵ Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

dosen yang bergelar doktor dan profsor. Sebab selama ini budaya ceramah lebih dominan di kalangan dosen Fakultas Dakwah.

Faisal Ismail memperoleh gelar guru besar (profesor) pada september 1997. Ia menekuni karier akademiknya sebagai dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1977, dengan mengampu mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Islam. Ia juga aktif mengajar di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Magister studi Islam UII Yogyakarta, sejak 1996, Pascasarjana Teologia Universitas Kristen Duta wacana Yogyakarta (1996 – 1999), Pascasarjana Teologia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (1997 – 1999), dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang (1999). Selama satu semester (Januari s/d April 1999, ia menjadi profesor tamu di almamaternya, Institut of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada, mengajar dalam mata kuliah “*Modern Islamic Development in Indonesia*”.⁵⁶

Kata kunci kesuksesan akademik Faisal Ismail dalam meraih gelar akademik tertinggi (profesor dan doktor), adalah karena rajin membaca dan menulis. Budaya menulis sudah sejak dini dikembangkan Faisal Ismail, baik menulis di media massa, menulis di jurnal ilmiah, hingga menulis buku. Dengan ketukunan dan produktivitas menulis tersebut, membuat karir akademik menjadi sangat maju, karena karya tulis yang dilahirkan menjadi poin untuk mendukung karir akademik hingga bisa meraih gelar profesor. Faisal Ismail sesungguhnya selalu memberi dorongan dan motivasi kepada koleganya para dosen UIN Sunan Kalijaga untuk terus belajar (studi lanjut) agar bisa meraih gelar akademik tertinggi (doktor). Ia juga mendorong para dosen agar rajin berkarya lewat tulisan di media massa, menulis di jurnal ilmiah dan juga menulis buku, agar kenaikan pangkat dosen bisa lebih cepat dan bisa meraih jenjang tertinggi sebagai profesor. Namun dorongan dan motivasi yang diberikan selama ini belum membuahkan hasil yang maksimal, karena hingga kini jumlah dosen yang bergelar profesor di fakultas dakwah masih tergolong sangat langka. Padahal Faisal Ismail tidak hanya sebatas membri

⁵⁶ Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

dorongan dan motivasi, namun ia benar-benar memberi teladan dengan ketekunan berkarya walaupun di usia yang tergolong senja. Budaya menulis tetap dengan tekun dilaksanakan Faisal Ismail, bahkan dari aspek produktivitas berkarya ilmiah di usia yang sudah senja saat ini, ia bisa mengalahkan dosen-dosen muda.

Selain mengajar, ia juga aktif membimbing para mahasiswa dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Selama empat tahun (2002 s/d 2006), ia tercatat sebagai salah satu anggota Dewan Guru Besar di Departemen Agama yang bertugas menilai karya ilmiah para dosen UIN/IAIN/ STAIN yang mengajukan usulan promosi pangkat guru besar. Sejak 2003 ia juga diminta oleh Institut Pengajian Islam Universiti Malaya, Kualulmpur, Malaysia, sebagai penguji luar (external reader) tesis/disertasi yang diajukan oleh para mahasiswa kepada Institut tersebut.

Membimbing skripsi, tesis, dan juga disertasi mahasiswa dengan tekun dilaksanakan Faisal Ismail. Ia tergolong sangat teliti dan hati-hati dalam membaca naskah-naskah yang ditulis oleh para mahasiswa. Dalam ketelitian tersebut tentu terkandung niat baik, agar mahasiswa bisa menghasilkan karya yang berkualitas. Tidak jarang ia berdiskusi panjang dengan mahasiswa bimbingannya terkait dengan ide yang ditulis dalam karya tersebut. Bahkan susunan kalimat dan kata-kata yang dibuat oleh mahasiswa dicermati betul oleh Faisal Ismail. Bagi mahasiswa yang ideal dan menginginkan karya tulisnya berkualitas tentu sangat setuju dan senang dengan model bimbingan yang diberikan Faisal Ismail. Namun bagi mahasiswa yang serba praktis dan tidak membutuhkan kualitas karya ilmiah, terkadang tidak setuju dengan model bimbingan Faisal Ismail.

Sebagai seorang akademisi, Faisal mencurahkan waktu, perhatian dan dedikasinya pada masalah-masalah ilmiah dengan komitmen yang sangat kuat. Sudah banyak buku karya Faisal yang telah diterbitkan, diantaranya:

1. Islamic Tradisionalism in Indonesia: a Study of the Nahdlatul Ulama's Early History and Religious Ideology.
2. Islam vis a vis Pancasila: Political Tensions and Accomodations in Indonesia 1945-1995.

3. Momentum Historis Gerakan Pencerahan Islam: Peranan Nabi Muhammad SAW dan Para Khalifah Al-Rasyidin dalam Membangun Masyarakat Madani.
4. Percikan Pemikiran Islam.
5. Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisis Historis
6. Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam-Pancasila.
7. Islam: Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah.
8. NU, Gus Durisme dan Politik Kiai.
9. Islam, Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah.
10. Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur
11. Ketegangan Kreatif Peradaban Islam, Idealisme dan Realisme.
12. Masa Depan Pendidikan Islam di Tengah Tantangan Modernitas.
13. Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik.
14. Menabur Inklusivisme, Mengubur Eksklusivisme: Visi dan Misi Islam Pluralis.⁵⁷

Dari daftar karya ilmiah dalam bentuk buku yang ditulis Faisal Ismail tersebut di atas, semakin memperjelas bahwa betapa besar komitmen dan dedikasinya dalam bidang keilmuan. Berbagai gagasan terus mengalir dari pikiran dan dituangkan dalam tulisan, sehingga masyarakat luas bisa membaca karya-karya tersebut. Kalau dicermati berbagai karya yang ditulis Faisal Ismail, ia mempunyai perhatian yang begitu besar pada persoalan sosial keagamaan, budaya, politik dan pendidikan. Sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, ia begitu banyak menulis karya yang terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Ada kegelisahan dalam pikirannya, terkait dengan gesekan kebudayaan dan politik yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga ia mencurahkan lewat karya tulis yang tergolong kritis mengurai berbagai persoalan yang dihadapi umat dalam pergumulan sosial, budaya dan politik.

⁵⁷ Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

Dalam karya-karya tulisnya itu, ia memberi analisis yang tajam bagaimana problem-problem sosial yang dihadapi umat, bagaimana potret pendidikan Islam dan bagaimana umat Islam mencari solusi terkait dengan berbagai perbedaan yang ada. Ia juga pernah menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah merupakan upaya pemerintah (kementerian agama) untuk meningkatkan pendidikan Madrasah yang bermutu. Adanya bantuan ini tentu sangat membantu lembaga pendidikan Islam yang bermadzhab sentralisasi. Secara umum Madrasah yang ada sangatlah kekurangan dana untuk mengoperasikan proses belajar mengajar, apalagi bagi lembaga pendidikan Islam swasta. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah seperti BOS, buku, dan bantuan lainnya sangat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Sama halnya dengan dana BOS, Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan upaya pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pendidikan Madrasah yang bermutu. Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Sebagai seorang penulis yang produktif di media massa, Faisal Ismail begitu banyak mengulas dan menganalisis berbagai

persoalan budaya, politik, pendidikan, sejarah, dan juga persoalan-persoalan aktual lainnya., sejarah, dan juga persoalan-persoalan aktual lainnya. Berikut ini beberapa ulasan dan analisis yang disampaikan sebagai bentuk dari perhatiannya yang begitu besar pada bangsa dan negara.

Terkait dengan kebijakan pemerintah (kemenag) tentang pendidikan Islam yang tetap memilih model sentralisasi, sedangkan pendidikan umum ikut otonomi daerah (desentralisasi). Dalam struktur organisasi yang berbentuk sentralisasi, membentang tegak lurus dari atas ke bawah. Segala sesuatu tentang urusan pendidikan mulai dari membentuk kebijakan, penentuan kurikulum, bangunan sekolah, hingga penyelenggaraan ujian, semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat (kemenag). Sedangkan sekolah di daerah hanya merupakan pelaksana pasif semata. Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah dan guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam prosedur pelaksanaan tugas, sangat dibatasi oleh peraturan melalui hirarki atasan.⁵⁸

Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya keseragaman yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan wilayah negara. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang setingkat dan sejenis. Misalnya keseragaman organisasi sekolah, rencana pelajaran, buku pelajaran, metode mengajar, soal-soal, dan waktu penyelenggaraan ujian, tanpa memperhatikan keragaman masing-masing daerah.

Pendidikan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan kehidupan serta kohesi nasional karena peserta didiknya adalah kelompok umur yang secara pedagogik sangat peka terhadap pembentuk kepribadian. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pendekatan sentralistik masih diperlukan, terutama untuk menentukan kurikulum pendidikan nasional dan menetapkan anggaran pendidikan, agar dapat dicapai kesamaan dan pemerataan standar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

⁵⁸Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

Adapun yang menjadi alasan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah, dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek politik desentralisasi dimaksudkan untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Kedua, dari aspek manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Ketiga, dari aspek kultural, desentralisasi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, dan keistimewaan satu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perkonomian dan kebudayaan. Keempat, dari aspek pembangunan, desentralisasi dapat melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui UU NO. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Penerapan desentralisasi pendidikan disertai dengan penataan fungsi kelembagaan pendidikan mulai dari dinas pendidikan di tingkat propinsi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai operasional kebijakan, dan lembaga-lembaga pendidikan dan kontrol terhadap kualitas pengembangan profesionalitas guru.

Penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya UU NO. 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. UU tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Demikian juga tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang cukup bagi daerah untuk lebih diberdayakan dalam arti fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar retorika.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi yang dilaksanakan sejak tahun 2000 membawa konsekuensi besar perubahan pendidikan di Indonesia. Sejumlah kaidah, ketentuan, peraturan, dan anca panduan menunjukkan bahwa berbagai unit antar pusat dan sekolah tak hanya sebagai perantara, penyampai, tetapi juga menjabarkan dan membuat kebijakan operasional dan membuat kebijakan sekolah. Dalam kaitannya dengan perubahan ini, unit-unit di kabupaten/kota perlu mengembangkan kapasitas merumuskan kebijakan operasional maupun kebijakan yang menjadi wewenangnya. Penerapan pendidikan yang sentralistik di sekolah dapat dilihat dari berbagai aspek.⁵⁹

Kalau dicermati berbagai kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah (Kemenag RI) terkait dengan pendidikan Islam, tentu sudah cukup banyak dan bervariasi. Kebijakan tersebut dalam bahasa politik selalu dibungkus dengan bahasa untuk kepentingan rakyat, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun terkadang dirasakan bahwa berbagai kebijakan yang muncul tersebut menjadi bagian dari "proyek" elit politik yang mempunyai wewenang untuk membuat dan mengganti sebuah kebijakan. Terkadang masyarakat menjadi bingung dengan begitu seringnya pergantian kebijakan tentang pendidikan. Kebijakan yang satu belum maksimal pelaksanaannya, sudah muncul lagi kebijakan baru dari pemerintah, sehingga berbagai kebijakan tersebut dinilai bagian dari "proyek" elit politik.

Khusus kebijakan pemerintah tentang pendidikan dirasakan oleh banyak pihak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Dalam hal ini kebijakan politik pada pendidikan Islam dirasakan ada perlakuan yang kurang adil, dengan adanya anggapan superior dan imperior, "anak kandung" dan "anak tiri", hingga kebijakan pendidikan dengan adanya yang sentralisasi (kemenag) dan desentralisasi (diknas). Kebijakan politik tentang pendidikan sekali lagi sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan elit politik. Kalau elit politik memiliki pendidikan yang baik, tentu ia akan memiliki komitmen yang baik pada pendidikan. Selanjutnya

⁵⁹ Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

kalau elit politik memiliki latar belakang pendidikan Islam yang baik, sudah jelas kebijakan politik yang lahir pun akan memberi perhatian yang layak pada pendidikan Islam.

Sejarah politik telah mencatat terkait dengan kebijakan politik pemerintah pada pendidikan Islam, bahwa di masa orde baru pendidikan Islam mendapat perlakuan yang kurang adil. Dari aspek anggaran pendidikan misalnya, pendidikan Islam mendapat bagian yang jauh lebih kecil dibanding dengan pendidikan umum. Akibatnya di berbagai daerah banyak gedung lembaga pendidikan Islam yang bocor, tidak terawat dan bahkan hampir roboh. Padahal di tempat lain, gedung lembaga pendidikan umum berdiri gagah dan mewah. Demikian pula halnya dengan tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam, banyak guru honor yang tak bisa diangkat menjadi PNS, walaupun mereka sudah puluhan tahun mengabdikan pencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tenaga honor di lembaga pendidikan umum bisa lebih mudah diangkat menjadi PNS. Alasan yang dibuat pemerintah terkait dengan kebijakan ini adalah dari aspek sumber honor.⁶⁰

Ketika para guru honorer di lembaga pendidikan Islam sumber honorinya dari yayasan, maka alasan pemerintah, mereka tidak bisa diangkat jadi PNS. Karena guru honor yang bisa diangkat jadi PNS adalah mereka yang sumber honorinya dari APBN atau APBD. Kategori ini sebagian besar dimiliki oleh guru honor yang ada di lembaga pendidikan umum. Walaupun para guru honorer di lembaga pendidikan Islam ini sudah berjuang keras untuk bisa diangkat menjadi PNS, namun kebijakan pemerintah belum berpihak kepada mereka. Padahal dari nilai perjuangan dan pengabdian yang mereka lakukan selama ini dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa tidak perlu diragukan lagi. Mereka benar-benar "ikhlas beramal" walaupun selama ini mereka hanya diberi honor yang sangat minim, bahkan dibawah UMR.

Demikian pula halnya dengan kebijakan politik pada pendidikan Islam yang tetap sentralisasi, menimbulkan berbagai konsekuensi yang terkadang dirasakan kurang adil dibanding

⁶⁰ Wawancara dengan Faisal Ismail, tgl 2 oktober 2013

dengan lembaga pendidikan umum. Ketika lembaga pendidikan umum masuk desentralisasi, secara birokrasi mereka menjadi bagian dari otonomi daerah, maka mereka pun mendapat dana dari APBD. Sementara pendidikan Islam yang bukan bagian dari PEMDA tidak bisa mendapat hak yang sama dengan pendidikan umum. Bahkan pernah keluar surat edaran dari menteri Dalam Negeri tahun 2012, yang meminta kepada Pemda, agar tidak memberi dana APBD kepada madrasah. Surat edaran tersebut akhirnya dicabut karena mendapat protes keras dari tokoh-tokoh Islam, yang menilai kebijakan tersebut sangat diskriminatif. Padahal sejatinya, pendidikan Islam sebagai soko guru pendidikan bangsa ini, tidak boleh dimarginalkan, baik dari aspek anggaran maupun kebijakan politik lainnya.⁶¹

Tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam merasakan betul adanya perbedaan kesejahteraan dibanding dengan tenaga pendidik di lembaga pendidikan umum terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi ini. Terlebih lagi di daerah yang APBD nya tergolong kaya, seiring dengan otonomi daerah, maka pemda memiliki wewenang untuk mengelola anggaran, termasuk untuk memberi tambahan penghasilan bagi guru di lembaga pendidikan umum. Ketika di daerah yang sama, ada guru yang memiliki pangkat yang sama, masa kerja yang sama, tapi penghasilan yang diperoleh dari pemerintah berbeda, tentu akan bisa menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial. Idealnya, pemda jangan sampai membuat kebijakan yang kurang adil antara guru di lembaga pendidikan Islam dengan guru di lembaga pendidikan umum.

Faisal Ismail telah banyak berpartisipasi dalam berbagai diskusi, seminar, dan konferensi baik tingkat nasional maupun internasional. Di antara konferensi dan simar internasional yang pernah diikuti adalah:

1. Peserta konferensi MESA/Middle East Studies Association (Washington, 1992).
2. Peserta seminar tentang "Muslim-Christian Relations:

⁶¹Faisal Ismail, *Pencerahan Spiritualitas Islam di Tengah Kemlut zaman Edan*, (Yogyakarta: Titian wacana, 2008)

- Past, Present and Future" (Jakarta, 1997).
3. Peserta seminar tentang "Islam and the Challenge of New Millenium" (Montereal, 1999)
4. Peserta seminar tentang " Said Nursis's Thought" (Jakarta, 2000).
5. Peserta seminar tentang "Towards a Civilized Project for the Renaissance of the Muslim World" 9Kairo, 2000).
6. Peserta seminar tentang "Educational Leadership and Policy Development: American Principles, Indonesian Practices" (Virginia, Amerika Serikat, 2001).
7. Penyaji makalah berjudul: "Common Responsibilities of Believers" (Yogyakarta, 2002).
8. Peserta Bishops-Ulama Conference (Manila, 2003).
9. Penyaji makalah berjudul: "Islam Hadhari dalam Pembinaan Tamaddun Masa Kini" (Malaysia, 2004).
10. Penyaji makalah berjudul: "Pancasila as the Basis of Indonesian State" pada Symposium on Law and Religion (Amerika Serikat, 2005).⁶²

Berbagai makalah yang pernah ia presentasikan di berbagai forum diskusi/ seminar dalam negeri antara lain:

1. Munawir Sjadzali dan pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, (di lembaga pengkajian dan pengamalan Islam UMY Yogyakarta, 1996).
2. Islam Sains dan Sekularisasi (di Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998).
3. Islam, Nahdlatul Ulama dan Toleransi antarumat Beragama (Yogyakarta, 1998).
4. Fenomena Politik Islam di Era Reformasi di Indonesia (Yogyakarta, 1999).

Faisal Ismail menmpuh karirnya dari bawah, yaitu sebagai pegawai negeri golongan II/a, di Kantor wilayah Departemen Agama Proponsi Bali, di Denpasar (1973 – 1974). Pada tahun

⁶²Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

1974 ia pindah ke almamaternya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan bertugas sebagai Kepala departemen Umum pada Lembaga Bahasa (1976 – 1983), seraya mengajar bahasa Inggris pada lembaga tersebut selama hampir sepuluh tahun. Pernah menjabat sebagai sekretaris Fakultas Dakwah (1983 – 1985) dan Pembantu Dekan bidang akademik Fakultas Dakwah (1985 – 1986). Masa jabatan sebagai pembantu dekan tidak dilaksanakan sampai selesai, karena ia lebih tertarik meneruskan studinya ke jenjang program S2 di Columbia University, New York, Amerika Serikat.

Setelah menyelesaikan program doktor di Kanada, Faisal ismail kembali ke Yogyakarta dan menjabat sebagai asisten direktur II Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Mei 1996 – Februari 1997). Dari Februari 1997 s/d Februari 2000, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Snan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kapasitasnya sebagai dekan, ia secara otomatis menjadi ketua senat Fakultas. Selama tiga bulan (Maret s/d Mei 2000) ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam kapasitasnya sbagai direktur Pascasarjana dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, ia secara otomatis menjadi anggota senat universitas. Ia tercatat pula sebagai anggota senat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, karena statusnya sebagai dosen di fakultas tersebut.

Menapaki karir struktural selanjutnya, Faisal pindah ke Jakarta, karena Menteri Agama Tolhah Hasan memberinya tugas baru sebagai Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI (Mei 2000 s/d Februari 2002). Selanjutnya, ia menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI (5 Februari 2002 s/d 23 Juni 2006).

Selama menjabat Sekjen Kemenag tersebut, ia bertugas di bawah kepemimpinan Menteri Agama Said agil Husin Al-Mumawwar dan Maftuh Basyuni. Usai melaksanakan tugas sebagai Sekjen Depag, ia memangku jabatan baru sebagai staf ahli Menteri Agama bidang hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia selama lima bulan (Juli 2006 s/d November 2006). Beralih dari

birokrat ke diplomat, Faisal menempati pos barunya di Kuwait City sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain, berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 40/P tanggal 26 September 2006.⁶³

Faisal Ismail telah banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, India, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Austria, Belanda, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Lebanon, Mesir, Tunisia, Afrika Selatan. Pada tahun 2004, Faisal Ismail memimpin rombongan para ketua majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, Muhammadiyah, dan NU) melakukan kunjungan ke Kairo, Vatikan, Bangkok dan New Delhi, dalam rangka melakukan studi banding dan sekaligus untuk memperluas visi, perspektif dan wawasan tentang pluralisme dan multikulturalisme yang sangat diperlukan dalam mengembangkan dialog, kerukunan, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.⁶⁴

Di tengah kesibukannya sebagai dekan fakultas Dakwah, direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Kepala Badan Litbang Agama, Sekretaris Jenderal Depag dan Duta Besar, Faisal Ismail juga masih sempat memanfaatkan sebagian waktunya untuk tetap menulis dengan penuh dedikasi dan komitmen yang kuat. Bagi Faisal, mengarang merupakan panggilan jiwa yang telah ia tekuni sejak muda. Kegiatan menulis artikel telah ia rintis sejak tahun 1960-an ketika ia masih belajar di PHIN Yogyakarta. Ia mempublikasikan karya-karyanya di majalah dinding sekolahnya.

Demikianlah sekilas uraian tentang profil Faisal Ismail terkait dengan profil pribadi, profil sebagai direktur Pascasarjana UIN, profil akademik dan pengalaman kerja sebagai Sekjen Kemenag RI, khususnya dalam kebijakan pada pendidikan Islam terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah

⁶³Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

⁶⁴Dokumentasi Faisal Ismail, tahun 2008

(BOS) untuk madrasah, dan juga kebijakan sentralisasi pada pendidikan Islam. Dari catatan profil singkat ini bisa diambil kesimpulan, bahwa sosok Faisal Ismail adalah pribadi yang sederhana, jujur, egaliter, dan disiplin dalam bekerja. Selain itu, dalam bidang tulis menulis, ia bisa menjadi teladan yang luar biasa bagi mahasiswanya, karena berbagai karya tulisnya, baik dalam bentuk opini di media massa, jurnal ilmiah, dan juga buku, menjadi bukti nyata ketekunan, kerja keras, dan produktivitas dalam berkarya. (**)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardana, *Mengenal tokoh Lewat Biografi*, Bandung, Rosdakarya, 2007
- Ahmad Wirawan, *Memahami Sejarah*, Bandung, Rosdakarya, 2008
- Deliar Noer, *Tokoh-Tokoh Indonesia dalam Biografi Politik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- E Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, Rosdakarya, 2005
- Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam, Sebuah Pengantar bagi Penulis Pemula*, Bandung, Rosdakarya, 1989
- H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Pendidikan Nasional*, Magelang, Tera Indonesia, 2001
- , *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung, Rosdakarya, 2008
- Ishartiwidkk, *Asesmen Kebutuhan Pengembangan Profesionalisme Guru*, Yogyakarta, UNY, 2000
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta, Kencana, 2010
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2005
- Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- M Ali Hasan, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2003
- Marlyn M Helms (ed), *Encyclopedia of Management*, Michigan, Gale Congege Learning, 2009

- Marsono, *Urgensi sejarah dalam Peradaban Manusia*, Yogyakarta, Kanisius, 2004
- Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978
- M Ngalim Purwano, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2010
- Nanang Fatah, *Landasan manajemen Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2011
- Rosihan Anwar, *Bahasa Jurnalistik*, Bandung, Rosdakarya, 2002
- Rosnila Kusuma, *Memahami Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta, LkiS, 2009
- Septiawan Sentana, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta, YOI, 2005
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2011
- Soebagijo I.N. *Jagat Wartawan Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2003
- Soeyanto, *Infleksibilitas Otonomi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Sumber lain:

- Dokumentasi Faisal Ismail
- Wawancara dengan Faisal Ismail
- Wawancara dengan pak Catur
- Wawancara dengan Achmad Munif
- Wawancara dengan Zainuddin
- Wawancara dengan Andi Andrianto
- Wawancara dengan pak Joko
- Wawancara dengan Arifin
- Wawancara dengan Ahmad Fauzy



BIOGRAFI

(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
periode Maret s/d Mei 2000)

Memahami dan mengenal sejarah adalah merupakan bagian penting dalam peradaban umat manusia. Begitu pentingnya memahami sejarah, sampai Soekarno pernah mengatakan dalam pidato politiknya tahun 1967, yang berjudul "jasmerah" (jangan melupakan sejarah). Karena sesungguhnya bangsa yang besar adalah mereka yang tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsanya. Mengetahui sejarah berarti bisa mengetahui peristiwa masa lalu untuk diambil hikmahnya sekaligus untuk diteladani aspek-aspek positif yang ada di dalamnya. Sebaliknya, manakala ada aspek negatif dari peristiwa sejarah tersebut agar bisa dihindari oleh generasi penerus.

Begitu pentingnya mengenal sejarah, maka begitu banyak muncul buku biografi tokoh yang menonjol dalam bidangnya masing-masing. Karena para tokoh tersebut memiliki keteladanan yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Biografi diperlukan karena biografi adalah karya tulis seseorang yang memaparkan riwayat hidup orang lain, biasanya karena perjuangannya yang patut dicontoh. Lewat biografi tersebut akan bisa dipahami bagaimana keteladanan, keunggulan, hingga berbagai strategi yang dilakukan seorang tokoh dalam menjalankan kebijakan.

Demikian pula dengan perjalanan sejarah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah cukup lama ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kemajuan yang diraih Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga saat ini tentu tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan para tokoh yang ikut andil di dalamnya, mulai dari karyawan, dosen, hingga direktur Pascasarjana. Dari aspek manajemen, tentu direktur Pascasarjana sebagai pemimpin kelembagaan memiliki kesempatan, wewenang, dan gagasan yang lebih luas untuk menentukan perkembangan Pascasarjana. Setiap pemimpin tentu memiliki gaya dan pemikiran yang berbeda, sehingga semakin menarik untuk diteliti dalam rangka menulis sejarah perkembangan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dari masa ke masa.

diterbitkan oleh:



bekerjasama dengan Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ISBN 9786028686-31-0



9 786028 686310